

**HAMBATAN-HAMBATAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH (STUDI KASUS
BANDA ACEH, SABANG DAN JANTHO)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RADHIYATI

NIM. 150802002

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2020 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radhiyati
NIM : 150802002
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 10 Maret 1997
Alamat : Jalan Mata Ie, Desa Ulee Tuy Dusun Abu Chik


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
Yang Menyatakan,


RADHIYATI
NIM. 150802002

**HAMBATAN- HAMBATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
ANTAR DAERAH (STUDI KASUS BANDA ACEH, SABANG
DAN JANTHO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

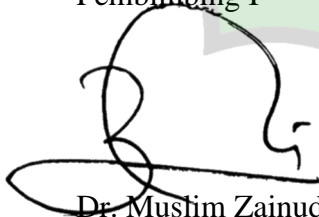
Oleh:

RADHIYATI
NIM. 150802002

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP.196610231994021001

Pembimbing II



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN.2017117904

**HAMBATAN-HAMBATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
(STUDI KASUS BANDA ACEH, SABANG DAN JANTHO)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 26 Agustus 2020 M

16 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



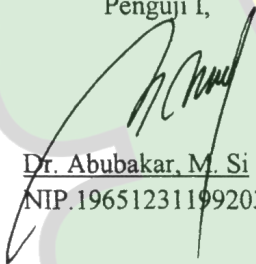
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP.196610231994021001

Sekretaris,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN.2017117904

Penguji I,



Dr. Abubakar, M. Si
NIP.196512311992031040

Penguji II,



Said Mayzar Mulya, S.STP., M.A
NIP.199005042010101001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN-AR-RANIRY Banda Aceh



Dr. Ermita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP.197307232000032002

ABSTRAK

Kerjasama antar wilayah Basajan (Banda Aceh, Sabang, Jantho/Kabupaten Aceh Besar) dikukuhkan sejak 2008 lewat persetujuan ketiga kepala daerah. Pembentukan kerjasama Basajan didasari oleh kesadaran ketiga daerah untuk bisa berkembang dan membangun bersama dengan memanfaatkan sistem hubungan antar wilayah. Kesepakatan Kerjasama ini diformalkan dalam bentuk MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang didukung oleh *Deutscher Entwicklungsdienst* (DED) dan *Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit* (GTZ) dari Jerman. *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ) adalah perusahaan internasional milik Pemerintah Federal Jerman. Namun pasca terbentuknya Basajan tersebut Basajan ini belum berjalan sebagaimana semestinya, banyak sekali permasalahan dan hambatan dalam implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kerja sama antar daerah Basajan dan apa faktor penghambat dalam progam kerja sama pembangunan antar daerah Basajan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara (informan) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Basajan vakum, Basajan diaktifkan kembali pada tahun 2013 oleh Tim Teknis Basajan dibantu oleh Tim Returning Expert dari CIM (*Center for International Migration and Development*) Jerman di tiga wilayah dengan berfokus kerjasama bidang pariwisata, infrastruktur dan sumber daya manusia. Tetapi itu hanya berjalan dua tahun, setelah itu Basajan hilang gaungannya lagi. Faktor penghambat jalannya basajan adalah terjadi kekosongan di BKR (Badan Kerjasama Regional), sumber daya manusia masih kurang, peraturannya kurang bagus (belum terbentuknya Perjanjian Kerja Sama (PKS), sulit mempertemukan tiga kepala daerah, dukungan dari provinsi masih kurang dan Tim teknis yang *handle* Basajan adalah PNS dari Bappeda masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah harus mendukung kerjasama Basajan ini dan BKR harus di aktifkan kembali dengan cara merekrut tenaga professional di bidang BKR.

Kata Kunci: Kerjasama, hambatan, Basajan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik. Shalawat diiringi salam kepada Rasulullah Shalallahu'alaihiWasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Adapun judul dari skripsi ini ialah: **“HAMBATAN-HAMBATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH (STUDI KASUS BANDA ACEH, SABANG DAN JANTHO)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Program Studi Strata-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Eka Januar, S.IP., M.Soc.Sc, selaku Ketua program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
5. Bapak Dr, Muji Mulia, S. Ag., M. Ag selaku Penasehat Akademik Penulis

6. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si dan Ibu Cut Zamharira, S.IP., M,AP selaku pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama masa perkuliahan dan juga kepada seluruh staff yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang turut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Agustiar ST M. SE (Subbid Pengembangan Infrastuktur) di BAPPEDA Aceh Besar yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Bapak Faisal Azwar, S.T., M.T Kepala BAPPEDA Kota Sabang yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Bapak Putra Rizkya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Bapak Dr. Abubakar, M.Si selaku Penguji I dan Bapak Said Mayzar Mulya, S.STP., M.A. selaku penguji II
12. Kepada Orang Tua Ibu Nurhayati dan Ayah Erwin telah memberi dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT.
13. Kepada Alya Thahira Nabila, Chory Puja Abdinoer, Khaira Safira, Mawaddah, dan seluruh teman-teman angkatan 2015 Ilmu Administrasi Negara Banda Aceh serta khusus kepada teman-teman di unit 01.
14. Kepada keluarga besar Youngsuak: Rina dan Suami, adik Laili dan adik Putri, bunda Indah dan paman Rizal, sepupu Amelia dan Nenek, kak Amna, Yahbit Dina beserta keluarga lainnya, terimakasih yang tak terhingga telah memberi dukungan penuh serta semangat mulai dari proses penulisan, penelitian hingga penyusunan.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
Yang Menyatakan,

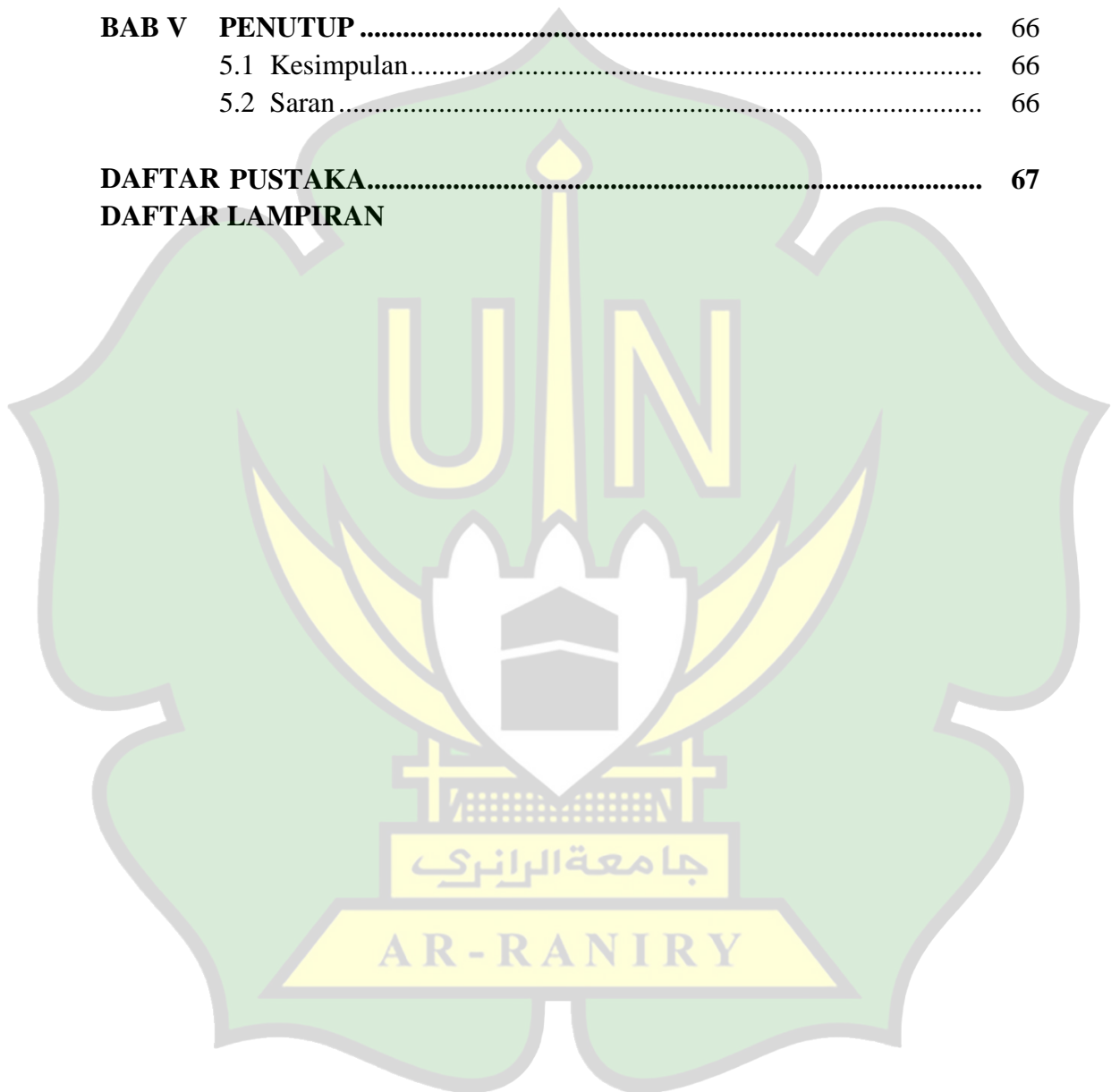
RADHIYATI
NIM. 150802002



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Lokasi Penelitian	8
1.5.3 Sumber Data	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.5 Teknik Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Analisis Program	17
2.3 Konsep Kerjasama Antar Pemerintah	17
2.4 Otonomi Daerah	24
2.5 Pemerintah Daerah	25
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	28
3.1 Gambaran Basajan.....	28
3.2 Konsep Basajan (Banda Aceh, Sabang dan Jantho).....	29
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	36
4.1 Perkembangan Kerjasama Antar Daerah Basajan	36
4.1.1 Landasan Penyelenggaraan Kegiatan	40
4.1.2 Kegiatan Basajan 2013-Sekarang	41

4.1.3 Rencana Program BASAJAN.....	44
4.1.4 Objek Wisata Andalan Basajan	47
4.1.4.1 Objek Wisata di Kota Banda Aceh.....	47
4.1.4.2 Objek Wisata di Sabang	54
4.1.4.3 Objek Wisata di Aceh Besar.....	55
4.2 Faktor Penghambat dan pendukung Dalam Progam Kerja Sama Pembanguna Antar Daerah Basajan	59
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.2	Tabel Kegiatan BASAJAN 2013-Sekarang.....	43
-------------	---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta BASAJAN	29
Gambar 4.1	Struktur BKR BASAJAN	37



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Selesai Penelitian
- Lampiran 5 Nota Kesepahaman, Undang-Undang, PERMA, DEKLARASI BASAJAN
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran utama pemerintah sebagai salah satu penggerak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aceh sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahnya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh untuk mengelola urusan Pemerintahnya sendiri. Hal ini menandai bahwa terjadi transisi atau perpindahan kewenangan dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.¹ Sehingga, ini menjadi suatu peluang bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan terhadap daerahnya. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah

¹ Budhi Setianingsih, dkk, Efektifitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREND). (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11, Hal. 1930. Diakses pada 18 Juli 2018

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji mengenai daerah yaitu adanya ketimpangan wilayah, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi demografi dan perbedaan kandungan sumber daya alam yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat adanya perbedaan tersebut, kompetensi suatu daerah dalam membangun proses pembangunan juga menjadi berbeda. Maka dari itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan antar wilayah ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan juga berdampak pada formulasi kebijakan suatu pembangunan wilayah oleh Pemerintah Daerah.²

Melihat bahwa daerah tidak bisa hidup dan berkembang dengan sendirinya maka perlu adanya hubungan lintas batas (*cross boundary*) dengan daerah sekitar. Dari hubungan inilah akan membentuk sistem wilayah (*region*). Untuk itu, perlu adanya kerjasama antar wilayah untuk dijadikan itu sebagai kerjasama Pemerintah Daerah. Kerjasama antar wilayah dapat dibentuk dalam berbagai tingkatan, seperti UNI EROPA (UE) adalah organisasi antarpemerintah dan supranasional, anggotanya merupakan 28 negara di Eropa yang lahir sejak 1 Juli 2013.³ JABODETABEKPUNJUR (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

² Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Hlm 104

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa (diakses pada tgl 14/11/2019 pukul 14:06)

Bekasi, Puncak dan Cianjur.⁴ KARTAMANTUL (Yogyakarta, Sleman dan Bantul), dan BASAJAN (Banda Aceh, Sabang dan Jantho). KARTAMANTUL sendiri dalam bidang persampahan telah membuahkan hasil yang saling menguntungkan dan bertujuan mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan daerah.⁵ Dibandingkan dengan Aceh yang sudah menerapkan Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN.

BASAJAN merupakan sebuah pembangunan antar-tiga daerah untuk menggali sumber potensi daerah melalui sistem dan kerjasama, khususnya dibidang Pariwisata, Infrastruktur Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lahir dari adanya kesamaan visi tiga kepala daerah BASAJAN yaitu, Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin, Walikota Sabang Munawarliza Zainal dan Bupati Aceh Besar Bukhari Daud di Banda Aceh pada bulan Juni 2008 bersamaan dengan acara HUT Kota Banda Aceh ke-803. Kesepakatan ini juga diformalkan ke dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor 17/MOU/2008, dan No 134.4/2531/2008 dan No 119/7424/2008 pada tanggal 6 Agustus 2008, dan Peraturan Bersama (Perma) No 18 Tahun 2009, No 25 Tahun 2009 dan No 25 Tahun 2009.

Pembentukan kerjasama BASAJAN juga tidak terlepas dari adanya dukungan dari Gubernur Aceh Ir. Irwandi Yusuf Msc, dalam Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No.66 tahun 2009 Tentang dukungan Kerjasama Regional BASAJAN. Secara khusus kerjasama BASAJAN mendapat dukungan dari *Deutscher*

⁴ Perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/metropolitan/3 (diakses pada tgl 11/11/2019 pukul 08:10)

⁵ Dika Fajri Fiisabiilillah dkk. 2004 Peran Modal Sosial Dalam Kerjasama Antardaerah Kartamantul. *Mimbar*. Vol. 30. Nomor 2. Hlm 217. Diakses Pada 10 April 2018

Entwicklungsdienst (DED) dan *Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit* (GTZ) dari Jerman. *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ) adalah perusahaan internasional milik Pemerintah Federal Jerman yang bekerja di berbagai bidang lebih dari 130 negara. GIZ umumnya bekerjasama dengan pemerintah negara, Lembaga negara dan di sektor swasta. Berpusat di Bonn dan Eschborn, Jerman. Organisasi ini berdiri pada tanggal 1 Januari 2011 melalui gabungan dari tiga organisasi Jerman yaitu DED, GTZ dan *Internationale Weiterbildung und Entwicklung* (InWEnt).⁶ Tindak lanjut dari berbagai dukungan tersebut mengkrystal dalam konferensi internasional BASAJAN di kantor Euro House di Banda Aceh pada pertengahan 2008 dan secara resmi didirikan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada 18 Juli 2008.⁷

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa BASAJAN ini belum berjalan sebagaimana semestinya. BASAJAN yang terbentuk pada tahun 2008 saat itu program Pariwisata sangat membuahkan hasil yang baik tetapi seiring waktu berjalan BASAJAN tidak terlihat lagi, pada tahun 2010 BASAJAN sudah terbentuk organisasi dan hanya aktif sekitar 6 bulan saja,. Pada tahun 2013 BASAJAN mendapat dukungan dari DED dan GTZ dari Jerman yang mendapatkan *support* dana dari Pemerintah Jerman selama 2 tahun. Pihak DED dan GTZ ini yang mengambil alih tugas BKR dan kembali hidup sampai awal 2014 dan menghasilkan beberapa produk seperti rencana strategis Pariwisata, kalender pariwisata dan kalender *event*. Kemudian itu hanya bertahan 2 tahun, pihak dari Jerman tidak

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Internationale_Zusammenarbeit#Profil (Diakses pada tanggal 14/11/2019 Pukul 14:39)

⁷ Bappeda Kota Banda Aceh, BASAJAN. Diakses tanggal 3 April 2019 dari situs <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/program-strategis/BASAJAN/>

melanjutkan lagi kerjasama dengan BASAJAN. Setelah tahun 2014 sampai sekarang BASAJAN tidak terlihat informasinya lagi.⁸

Selain itu faktor pergantian posisi kepala dinas menjadi penghambat yang menyebabkan pada saat diadakan rapat seperti mengulang program yang sama dan banyak pekerja di Banda Aceh bertempat tinggal di Aceh Besar menyebabkan Aceh Besar Men-*supplay* banyak kendaraan ke Banda Aceh serta sistem keuangan atau anggaran di setiap daerah (Banda Aceh, Sabang dan Jantho) berbeda-beda. Selanjutnya faktor yang lain ialah Ketiga antar-daerah belum saling mendukung, adanya faktor internal yang terjadi pada daerah masing-masing, tim teknis BASAJAN belum mempertemukan kepala ke-3 daerah tersebut, masih banyak yang belum mengetahui apa itu BASAJAN, ke-3 daerah mengalami kendala yang berbeda-beda serta kontribusi dari daerah yang satu dengan daerah yang lain masih adanya Batasan.

Mengingat perannya bisa menggali potensi wilayah, kerjasama yang luas dan saling melengkapi serta bisa mengurangi disparitas antara Banda Aceh, Sabang dan Jantho. Antara Banda Aceh-Sabang-Jantho itu merupakan kabupaten terdekat dipaling ujung Aceh, jika pembangunan BASAJAN dimajukan lebih baik lagi dapat mempengaruhi kabupaten lainnya untuk maju dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai “Pengaruh Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Studi Kasus BASAJAN)”.

⁸ Wawancara dengan salah satu pegawai BAPPEDA KOTA BANDA ACEH bidang kerjasama BASAJAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perkembangan kerjasama antar daerah BASAJAN ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam progam kerjasama pembangunan antar daerah BASAJAN ?

1.3 Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kerjasama antar daerah BASAJAN.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung dalam progam kerjasama pembangunan antar daerah BASAJAN.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya mengenai teori untuk perkembangan ilmu administrasi negara dalam bidang pembangunan

daerah dan kerjasama daerah. Selebihnya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang menyangkut topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan bahan masukan yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN untuk mendorong BASAJAN tersebut untuk lebih eksis dan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi dalam periode yang lama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya. Adapun penelitian lapangan ini penulis akan terjun langsung untuk memperoleh data dari berbagai sumber.

Penelitian ini didasari dengan maksud menggambarkan secara deskriptif mengenai studi tentang analisis terhadap hambatan kerjasama antar daerah

BASAJAN (Banda Aceh, Sabang dan Jantho). Hal tersebutlah yang menjadi fokus dan dikaji serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini.⁹

1.5.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor BAPPEDA Kota Banda Aceh, Sabang dan Jantho yang mengurus tentang kerjasama BASAJAN, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Penulis sudah melakukan observasi awal di Kantor BAPPEDA kota Banda Aceh dengan salah satu pegawai pada bagian kerjasama BASAJAN. Peneliti juga melihat film dokumenter tentang BASAJAN dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan sudah sedikit mendapatkan informasi tentang BASAJAN (Banda Aceh, Sabang dan Jantho)
- b) Peneliti mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi penelitian bisa dijangkau oleh peneliti. Tujuan memilih judul skripsi adalah mengingat perannya bisa menggali potensi wilayah, kerjasama yang luas dan saling melengkapi serta bisa mengurangi disparitas antara Banda Aceh, Sabang dan Jantho. Antara Banda Aceh-Sabang-Jantho itu merupakan kabupaten terdekat dipaling ujung Aceh, jika pembangunan BASAJAN dimajukan lebih baik lagi dapat mempengaruhi kabupaten lainnya untuk maju dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi

⁹ Anggito Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi penelitian kualitatif. hlm 11

1.5.3 Sumber Data

Sumber Data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada pegawai yang bekerja pada bagian kerjasama BASAJAN di BAPPEDA Kota Banda Aceh, Sabang dan Jantho.

b) Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berasal dari sumber tertulis maupun online (skripsi, web, jurnal, *e-book*, *google book*).¹⁰

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan Teknik pengumpulan data yaitu :

a) Observasi.

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat dan mengamati langsung secara visual di lokasi penelitian.¹¹ Dalam buku Rianto Adi juga mengatakan bahwa, pengamatan observasi merupakan data untuk menjawab masalah penelitian yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran)

¹⁰ Hasan Iqbal. 2008. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Hlm 19

¹¹ Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. hlm 75

diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian yang telah diamati tersebut dicatat dan selanjutnya dianalisis.¹²

Teknik ini dilakukan langsung untuk mendapat data langsung dari lapangan yang menjadi subjek penelitian ini. Dalam hal ini peneliti benar-benar melihat langsung agar peneliti memahami proses-proses tertentu. Di samping itu juga teknik ini sekaligus dapat mengecek langsung kebenaran setiap data yang disampaikan oleh para informan ketika diskusi. Tujuan dari observasi dalam penelitian ini yaitu untuk melihat lebih jauh tentang hambatan internal maupun eksternal kerjasama pembangunan antar daerah BASAJAN

b) Wawancara (informan)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹³ Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pula, narasumber yang dijadikan sebagai informan berjumlah 3 (empat) orang yaitu

- Bapak Agustiari ST M.SE (Subbid Pengembangan Infrastruktur) di BAPPEDA Aceh Besar
- Bapak Faisal Azwar, S.T., M.T Kepala BAPPEDA Kota Sabang
- Bapak Putra Rizky Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh

¹² Rianto Adi. 2014. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Hlm 225

¹³ Nasution. 2011. Metode Reseach (Penelitian Ilmiah). hlm 113.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa jurnal, gambar, buku, surat kabar, dan juga dalam bentuk film.¹⁴ Data yang diambil dari dokumentasi tentunya sangat berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga semakin memperkuat data-data penelitian. Misalnya data dokumen dari kantor BAPPEDA Kota Banda Aceh, jurnal atau skripsi, buku dan juga dalam bentuk Video. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan antara lain buku tahunan BASAJAN, beberapa arsip BASAJAN, buku laporan tentang BASAJAN dan lain-lain yang berkenaan dengan BASAJAN.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif, ada 3 (tiga) langkah dalam menganalisis data yaitu:

a) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data-data yang telah direduksi atau dirangkum tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa dilokasi kejadian serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

¹⁴ Jalaluddin Rahmat. 2004. Metode Penelitian. Hlm 87.

b) Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian, kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti khususnya yang berkaitan dengan peran masyarakat transmigrasi terhadap masyarakat lokal untuk memajukan perekonomian masyarakat

c) Verifikasi/ penarikan kesimpulan

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.¹⁵

¹⁵ Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. hlm 92

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, akan dijadikan beberapa kerangka teori penelitian terdahulu untuk mendukung masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Berikut merupakan penelitian terkait dengan penelitian yang akan ditulis.

1. Siti Marhamah dan Abd. Jamal ¹⁶, 2016 “*Analisis Ketimpangan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Kawasan BASAJAN*”. Hasil penelitian pada koefisien konvergensi mendapatkan bahwa Kab/Kota wilayah BASAJAN diperoleh tingkat ketimpangan paling rendah pada tahun 2009 sebesar 0,7565. Hasil analisis shift share menunjukkan bahwa total keseluruhan sebesar 80.648.801 juta rupiah merupakan total pertambahan PDRB di kawasan BASAJAN. Secara keseluruhan semua sektor di kawasan BASAJAN mempunyai pengaruh pertumbuhan wilayah (N) yang positif dan ada empat sektor yang mempunyai bauran industri (P) yang bagus yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran, bangunan, listrik dan air bersih, dan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa selama periode 2008-2013 kinerja semua sektor ekonomi menunjukkan hasil yang positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri

¹⁶ Siti Marhamah dan Abd. Jamal. 2016. Analisis Ketimpangan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Kawasan BASAJAN. Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syiah Kuala. Vol 1 No 1. hlm 246-253.

pengolahan yang bernilai negatif dan diikuti perubahan struktur ekonomi dengan indikasi dalam masa transisi dari perekonomian yang didominasi sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

Terdapat kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Marhamah dan Abd. Jamal dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu objek yang diteliti adalah Penelitian dilakukan di tiga Kab/Kota yaitu Kota Banda Aceh, Sabang, dan Jantho-Aceh Besar. Akan tetapi perbedaan yang telah dilakukan oleh Siti Marhamah dan Abd. Jamal melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis konvergensi sigma dan analisis shift share. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis lebih menekankan pada perkembangan kerjasama antar daerah BASAJAN.

2. Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Apatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda¹⁷, 2012 “*Kerjasama Antarprovinsi Untuk Pembangunan Regional Kalimantan Yang Terintegrasi*”. Hasilnya adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam praktek kerjasama antardaerah adalah minimnya pedoman atau peraturan sebagai panduan pelaksanaan kerjasama, minimnya kapasitas SDM aparatur pelaksana kerjasama, lemahnya koordinasi antar satker, serta belum rapinya dokumentasi pelaksanaan dan hasil kerjasama. Oleh karenanya, perjanjian kerjasama maupun MoU yang sudah ditandatangani kadang belum diimplementasikan. Sedangkan disisi

¹⁷ Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Apatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda. 2012. *Kerjasama Antarprovinsi Untuk Pembangunan Regional Kalimantan Yang Terintegrasi*. Vol. 8. No. 1. diakses pada 16-04-2018

lain, kerjasama yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil temuan lapangan adalah (1) hubungan kerjasama antar provinsi dalam lingkup regional Kalimantan diwujudkan dengan membentuk forum koordinasi, konsultasi berupa FRKP2RK dan sebuah badan yang bernama (Kelompok Tumbuh Bersama) KTB; (2) efektifitas hubungan kerja tersebut masih rendah karna forum pra-musrenbang, belum sampai kepada rencana aksi berupa program dan kegiatan yang konkrit; (3) untuk mengoptimalkan forum tersebut maka adanya dukungan oleh para pelaku usaha (swasta maupun BUMN/BUMD) serta masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan.

Terdapat kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Apatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian ini bertujuan mengetahui apa dan bagaimana hubungan antar provinsi serta kendala yang dihadapi. Metode menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta pengumpulan data sekunder. Akan tetapi perbedaannya peneliti tidak menggunakan metode evaluasi dan pengumpulan data tidak dilakukan dengan cara *focus group discussion (FGD)*.

3. Budhi Setianingsih dkk¹⁸, “Efektifitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs)”. Hasilnya dalam indikator satuan waktu, proses pengaplikasian di kota Malang masih belum efektif. Namun ketepatan waktu

¹⁸ Budhi Setianingsih, dkk, Efektifitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs).(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11, Hal. 1930. Diakses pada 18 Juli 2018

dalam perencanaan pembangunan masih belum didukung secara maksimal oleh Simrenda dan masih belum mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Dalam indikator satuan hasil, ditinjau dari prespektif perencanaan pembangunan melalui Simrenda juga belum efektif sehingga pembangunan di kota Malang masih kurang relevan dengan visi daerah yang berorientasi kepada masyarakat miskin. Dalam indikator kualitas kerja, Berdasarkan LAKIP persentase capaian kerja BAPPEDA dalam pengaplikasian Simrenda masih belum optimal. Hal ini karena keterbatasan pengaplikasian Simrenda yang belum memadai. Dalam kepuasan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah di kota Malang masih rendah karena respon dan aksi yang negatif masyarakat terhadap pembangunan. Hal tersebut menandakan bahwa Simrenda masih belum efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di kota Malang.

Terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh oleh Budhi Setianingsih dkk dengan penelitian yang penulis teliti, Penelitian dilakukan di kantor BAPPEDA. Akan tetapi perbedaannya penelitian oleh Budhi Setianingsih dkk melihat kajian efektivitas perencanaan pembangunan daerah Simrenda dalam beberapa indikator. Sedangkan penulis melihat bagaimana kerjasama antarprovinsi BASAJAN dan kendala yang dihadapi oleh BASAJAN itu sendiri pada saat menjalankan tugasnya.

2.2 Analisis Program

Definisi program termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi masyarakat.¹⁹ Dalam proses pelaksanaan program adanya program yang berhasil, kurang berhasil dan program tidak berhasil jika ditinjau dari hasil yang dicapai.

Maka dapat ditarik kesimpulannya adalah bahwa program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berbentuk prosedur atau lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

2.3 Konsep Kerjasama Antar Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. Kerjasama daerah adalah Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga.²⁰ Pihak ketiga sebagaimana dimaksud didalam kerjasama antar daerah itu adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Untuk

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah

melaksanakan kerjasama daerah, maka dapat dibentuk Badan Kerja, yaitu suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.²¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidaklah mungkin hidup sendirian. Manusia akan melakukan kerjasama, membentuk suatu kelompok-kelompok, serta melakukan kerjasama kelompok. Untuk itu didalam kehidupan sehari-hari, akan terjadinya kerjasama antar individu, antar kelompok bahkan antar negara. Sebuah daerah harus bekerjasama dengan daerah lain untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhannya. Secara umum, kerjasama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau beberapa pihak yang mempunyai tujuan dan capaian arah yang sama.²²

Kerjasama antar pemerintah perlu diperhatikan karna perannya dapat membantu kebutuhan masyarakat di daerah, begitu juga dapat memperkuat tali persaudaraan dalam memperkuat pertahanan daerah. Alasan utama dalam kerjasama pemerintah adalah agar berbagai masalah di setiap daerah dapat diselesaikan secara bersama dan potensi yang ada di setiap daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Alasan lain dalam kerjasama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut.²³

²¹ Teguh Budi Prasetya. 2013. Potret Kerjasama Antardaerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. Jurnal Maksipreneur Vol. I. No. 2. hlm 1 – 16

²² Janu Ismadi. 2019. Kerjasama Luar Negeri Indonesia. Hlm. 01

²³ Yeremias T. Keban. Penulis adalah Dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, dosen pada MAP, MPKD dan MEP UGM di Yogyakarta, dan konsultan capacity building for local government, human resource management, dan poverty alleviation pada beberapa Program Pemerintah sejak 1999.

1. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk *kekuatan yang lebih besar*. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat dipadukan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
2. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai *kemajuan yang lebih tinggi*. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan menerima kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Pada setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.
3. Pihak-pihak yang bekerjasama *dapat lebih berdaya*. Dengan kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur Pemerintah yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara pribadi memperjuangkan kepentingannya sendiri, ia mungkin akan kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.
4. Pihak-pihak yang bekerjasama *dapat memperkecil atau mencegah konflik*. Dengan bekerjasama, daerah yang mulanya berkonflik dapat bersikap lebih baik dan mengambil manfaat dari konflik tersebut.

5. Masing-masing pihak lebih *merasakan keadilan*. Masing-masing daerah mempunyai akses informasi yang sama dan tidak dibeda-bedakan agar tidak dirugikan karena ada transparansi dalam hubungan kerjasama.
6. Masing-masing pihak yang bekerjasama antar daerah akan memelihara *keberlanjutan* penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati sesama partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
7. Kerjasama ini dapat menghilangkan *ego daerah*. Melalui kerjasama tersebut, kecenderungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

Metode dan bentuk kerjasama antar Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :²⁴

1. *Intergovernmental service contract*. Dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak.
2. *Joint service agreement*. Dilakukan untuk menjalankan fungsi seperti perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah.

²⁴ Yeremias T. Keban. Penulis adalah Dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, dosen pada MAP, MPKD dan MEP UGM di Yogyakarta, dan konsultan capacity building for local government, human resource management, dan poverty alleviation pada beberapa Program Pemerintah sejak 1999.

3. *Intergovernmental service transfer*. Transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, Pemerintah dan keuangan publik.

Kemudian, pendapat lain menyatakan bahwa suatu kerjasama antar pemerintah daerah, dapat dilakukan dalam beberapa bentuk perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas :²⁵

1. *Handshake Agreements*, yaitu perjanjian kerjasama yang tidak tertulis. Bentuk “*handshake agreements*” merupakan bentuk yang banyak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman (*mis understanding*).
2. *Written Agreements*, yaitu perjanjian kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis untuk melakukan program kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit pelayanan bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian tertulis meliputi perencanaan kerjasama, anggaran, pemeliharaan daerah, sumber daya bersama dan cara pemecahan konflik.

Adapun Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip menurut Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007:²⁶

1. Efisiensi;
2. Efektivitas;
3. Sinergi;
4. Saling Menguntungkan;

²⁵ *Ibid.* Yeremias T. Keban

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

5. Kesepakatan Bersama;
6. Itikad Baik;
7. Mengutamakan Kepentingan Nasional Dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Persamaan Kedudukan;
9. Transparansi;
10. Keadilan; Dan
11. Kepastian Hukum.

Agar kerjasama tersebut berhasil dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam “*good governance*”. Beberapa diantara prinsip *good governance* yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar daerah yaitu:²⁷

1. Transparansi.

Pemerintah daerah melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai macam data dan informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah dalam rangka kerjasama tersebut tanpa ditutup-tutupi.

2. Akuntabilitas.

Pemerintah Daerah yang telah melakukan kerjasama bersepakat untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait kerjasama termasuk DPRD sebagai wakil rakyat atau kepada para pengguna pelayanan public.

²⁷ Yermias T. Keban. Penulis adalah Dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, dosen pada MAP, MPKD dan MEP UGM di Yogyakarta, dan konsultan capacity building for local government, human resource management, dan poverty alleviation pada beberapa Program Pemerintah sejak 1999.

3. Partisipatif.

Pemerintah Daerah dalam bekerjasama harus memegang prinsip partisipasi dan digunakan dalam bentuk komunikasi atau bentuk lainnya agar tercapai dalam menentukan tujuan bersama.

4. Efisiensi.

Pemerintah Daerah dalam bekerjasama harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menggunakan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.

5. Efektivitas.

Pemerintah Daerah dalam kerjasama daerah harus mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh.

6. Konsensus

Pemerintah daerah dalam bekerjasama harus mencari titik temu agar masing-masing pihak yang bekerjasama dapat menyetujui suatu keputusan atau kebijakan.

7. Saling menguntungkan dan memajukan.

Pemerintah Daerah dalam bekerjasama harus memegang teguh prinsip saling menguntungkan, saling menghargai dan saling memajukan daerah satu sama lain. Salah satu prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama.

2.4 Otonomi Daerah

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengatur Tentang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan. Daerah ini disebut daerah otonom karena penduduknya berhak mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan prakarsanya sendiri. Maksudnya, daerah tersebut memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya (kepentingannya sendiri) yang diperbolehkan oleh undang-undang tanpa mendapat campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Di sini posisi pemerintah pusat hanya mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan agar penyelenggaraan otonominya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pihak yang mengisi penyelenggaraan urusan rumah tangga pada daerah otonom adalah masyarakat daerah otonom tersebut. Sebab pada hakekatnya yang diberi otonomi adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, bukan daerah atau pemerintah daerah. Karena itu, dalam daerah otonom masyarakat sendiri yang menentukan cara mengatur dan mengurus kepentingannya. Untuk itu, masyarakat memilih kepala daerah dan wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan, membuat program, dan mengawasi jalannya Pemerintah.

Dalam daerah otonom dibentuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah otonom adalah Pemerintah Daerah yang badan Pemerintahnya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Misal, di kabupaten dan kota dibentuk pemerintah daerah kabupaten/kota. Bupati dan walikota dipilih oleh rakyat sendiri. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya.

Perbedaan antara daerah otonom dengan otonomi daerah adalah daerah otonom menunjuk pada daerah/tempat (geografi) sedangkan otonomi daerah menunjuk pada isi otonomi/kebebasan masyarakat. Charles Eismann menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Sementara Ellie Liang Gie menjelaskan otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk.²⁸

2.5 Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

²⁸ Hanif Nurcholis. Teori dan praktek Pemerintah dan otonomi daerah. Pt gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007 hlm 25-30

urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah diberi diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), kekuasaan dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Pasal 18 UUD 1945 tersebut terdapat 5 hal penting tentang Pemerintah Daerah:

1. Dalam Negara Indonesia tidak terdapat negara bagian atau dalam istilah Penjelasan tidak memiliki daerah yang bersifat staat juga. Artinya negara Indonesia sebagai negara kesatuan tidak memiliki negara bagian di dalamnya;
2. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil;
3. Daerah-daerah provinsi maupun daerah yang lebih kecil ada yang bersifat otonom dan ada pula yang bersifat daerah administrasi belaka;
4. Pemerintah daerah baik provinsi maupun daerah yang lebih kecil harus berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan undang-undang;
5. Pemerintah Daerah harus memperhatikan bekas-bekas daerah swapraja dan kesatuan hukum masyarakat pribumi. Daerah-daerah swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yang memiliki susunan asli harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah yang bersifat istimewa setelah dilakukan

pembaruan yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem Pemerintahnya.

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:²⁹

- a. Pendapatan asli daerah yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil perusahaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan yang terdiri atas:
 - 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam;
 - 2) Dana alokasi umum;
 - 3) Dana alokasi khusus.
- c. Pinjaman daerah;
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

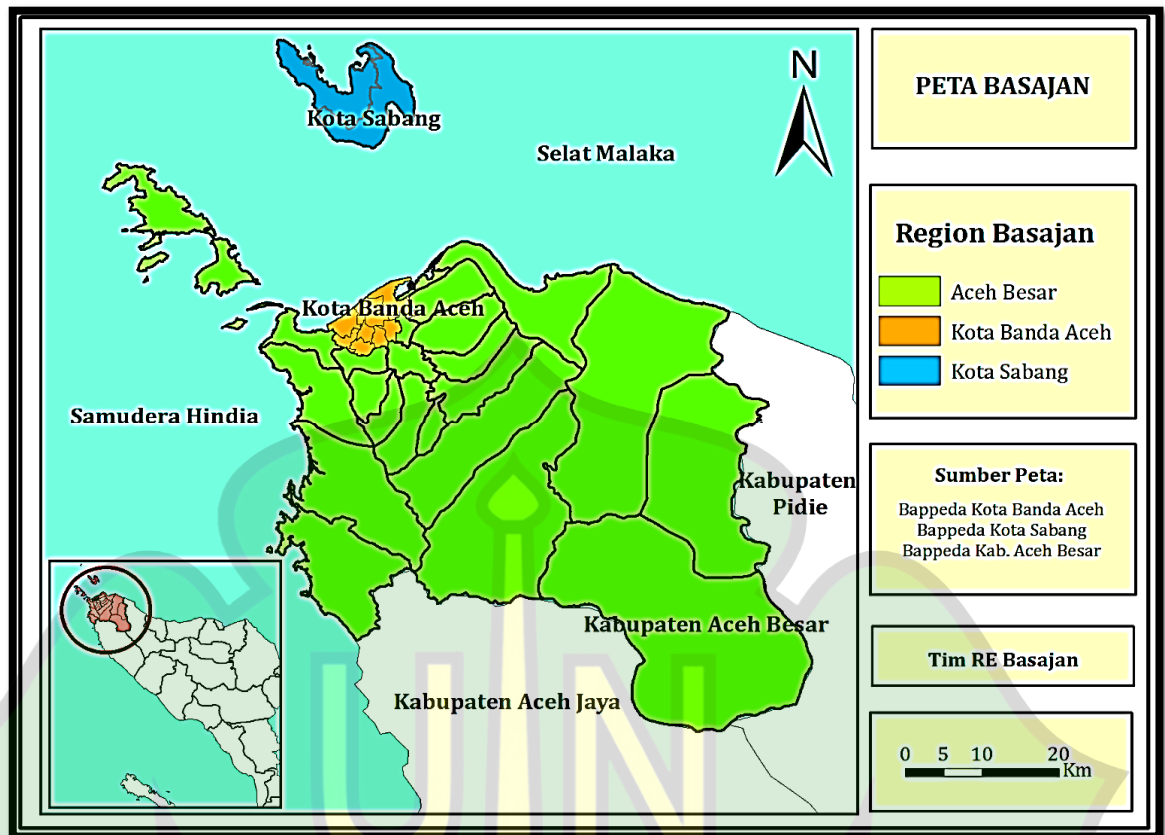
²⁹ Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran BASAJAN

Wilayah BASAJAN terdiri dari tiga kabupaten/ kota, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar. Region BASAJAN terletak pada koordinat 50 2'-50 54' LU dan 95,00 - 95,80 B T dengan total luas wilayah mencapai 3188.48 km². Sebagian besar kawasan BASAJAN (93%) adalah wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar. Wilayah BASAJAN terdiri dari 34 kecamatan dan 712 gampong. Dari total ini, 9 kecamatan (90 gampong) terdapat di wilayah administratif Kota Banda Aceh, 2 kecamatan (18 gampong) di Kota Sabang, dan 23 kecamatan (604 gampong) di Kabupaten Aceh Besar. Kawasan BASAJAN di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Selat Malaka, sebelah barat dengan Samudera Indonesia, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Samudera Indonesia. Ketiga daerah BASAJAN memiliki karakteristik dan kondisi wilayah yang bervariasi. Hal ini turut mempengaruhi pengembangan pariwisata ketiga wilayah, baik dalam hal jumlah dan tipe turis, fasilitas dan layanan yang berhubungan dengan pariwisata dan lain-lain. Peta wilayah BASAJAN adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Peta BASAJAN
Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh

3.2 Konsep BASAJAN (Banda Aceh, Sabang dan Jantho)

Untuk mengantisipasi perubahan ekonomi pasca tsunami, setelah para donor menyelesaikan bantuan dan kegiatan BRR yang telah selesai maka Pemerintah Kota Banda Aceh berusaha meningkatkan kapasitas manajemen termasuk koordinasi antara eksekutif dengan lembaga legislatif, antara Pemerintah dengan *stakeholder* dan antar kabupaten/kota yang kerjasama BASAJAN didasarkan pada keinginan untuk memajukan daerah dan kesadaran bahwa dengan memadukan potensi akan diperoleh hasil yang lebih baik. Ketiga daerah menyadari hal ini dan sepakat membentuk wadah kerjasama yang merupakan bentuk ikatan yang saling

menguntungkan sehingga akan mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kemajuan daerah.

BASAJAN merupakan sebuah program kerjasama pembangunan antar-tiga daerah. Kesepakatan ini diformalkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor 17/MOU/2008, dan Nomor 134.4/2531/2008 dan Nomor 119/7424/2008” tertanggal 6 Agustus 2008 tentang Kerjasama Regional Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar (BASAJAN).³⁰ Maksud kerjasama BASAJAN adalah untuk menggali sumber potensi daerah melalui jalinan sistem dan program kerjasama yang lebih sinergi guna mewujudkan keberhasilan dari pembangunan SDM, SDA, bisnis dan ekonomi terpadu serta kerjasama pembangunan di dalam wilayah masing-masing.

Selain itu, pengembangan harus diprioritaskan ke objek wisata andalan yang memiliki paling tidak memiliki infrastruktur dasar daya tarik tinggi. BASAJAN Bersama Menciptakan Regional Competitiveness (Keunggulan Regional)

- Ketiga wilayah memiliki keunggulan potensi masing-masing dan terhubung dalam sistem kota-kota
- Banda Aceh merupakan pusat Pemerintah, ekonomi, pendidikan dan budaya Aceh, SDM dan IT yang baik, memiliki wisata sejarah dan wisata tsunami
- Sabang memiliki potensi wisata bahari kelas dunia
- Aceh Besar memiliki potensi besar dalam pertanian, SDA, lahan yang luas dan wisata alam

³⁰ Nota Kesepahaman Nomor 17/MOU/2008, dan Nomor 134.4/2531/2008 dan Nomor 119/7424/2008 Tentang Kerjasama Regional Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar (BASAJAN)

- Kerjasama antar daerah BASAJAN akan mampu memaksimalkan potensi berbeda setiap daerah BASAJAN yang akan menguntungkan ketiga daerah
- Dalam jangka waktu panjang, Kerjasama Daerah yang efektif akan meningkatkan *keunggulan regional (Regional Competitiveness) BASAJAN*
- Keunggulan Regional BASAJAN adalah *kunci* untuk menarik *investor, bisnis, turis, innovator dan sumber daya manusia unggul ke BASAJAN* yang akan meningkatkan performa ekonomi ketiga daerah

Tujuan kerjasama BASAJAN adalah :

- 1) Menciptakan keterpaduan pembangunan antara Kabupaten dan Kota dalam Kerjasama BASAJAN
- 2) Menciptakan regulasi yang tepat, stabilitas investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 3) Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien.

Sasaran Kerjasama BASAJAN adalah :

- 1) Teridentifikasinya sektor-sektor unggulan 3 (tiga) daerah yang saling menguntungkan dalam melaksanakan kerjasama di Kawasan BASAJAN
- 2) Terwujudnya pemberdayaan SDM, dan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan secara bersama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik dan peningkatan pendapatan daerah
- 3) Tersedianya infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pariwisata BASAJAN sebagai salah satu daerah kunjungan wisata wilayah barat sumatera

- 4) Tersedianya regulasi dan infrastruktur yang tepat untuk investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 5) Terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien.

Ruang lingkup kerjasama BASAJAN adalah:

- 1) Bidang Sumber Daya Manusia
- 2) Bidang Sumber Daya Alam
- 3) Bidang Infrastruktur, Informasi dan Teknologi
- 4) Bidang Pengembangan Pariwisata.

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini bersumber dari Hibah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing Kabupaten/Kota dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pada tanggal 2 April 2019 bertempat di Sabang, kepala daerah masing-masing daerah mengadakan Nota Kesepakatan Bersama yang baru Dalam Rangka Kerjasama Daerah BASAJAN, Yaitu:

1. Kerjasama BASAJAN sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh Tiga daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan Pelayanan Publik
2. Penyelenggaraan kerjasama daerah dalam berbagai program dan kegiatan akan diatur dalam masing-masing perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kerjasama daerah BASAJAN dibentuk Sekretariat Bersama yang terdiri dari perwakilan masing-masing daerah, yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama kepala daerah BASAJAN.

Peraturan Bersama (Perma) Walikota Banda Aceh, Sabang dan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2009 (Banda Aceh), Nomor 25 Tahun 2009 (Sabang) dan Nomor 25 Tahun 2009 (Aceh Besar) tentang Pembentukan Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN Walikota Banda Aceh, Sabang dan Bupati Aceh Besar.³¹ Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Peraturan Bersama ini bertujuan mengatur Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan kerjasama BASAJAN. Dengan peraturan ini dibentuk badan kerjasama BASAJAN. Selain itu juga mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, keorganisasian, sekretariat, kelompok kerja teknis dan lain sebagainya.

Kemudian kerjasama Antar Walikota Banda Aceh, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar dibentuk kedalam Deklarasi BASAJAN pada hari Jum'at 12 Juni 2009 di Banda Aceh yang berbunyi: (1) Melakukan Kerjasama Regional Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar dalam wadah BASAJAN. (2) Menyatakan akan melakukan kerjasama Regional dalam bidang pariwisata, peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur. (3) Menyatakan akan memberikan dukungan

³¹ Peraturan Bersama (Perma) Walikota Banda Aceh, Sabang dan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2009 (Banda Aceh), Nomor 25 Tahun 2009 (Sabang) dan Nomor 25 Tahun 2009 (Aceh Besar) tentang Pembentukan Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN Walikota Banda Aceh, Sabang dan Bupati Aceh Besar

sepenuhnya untuk membangun kerjasama BASAJAN menjadi sebuah Kawasan ekonomi baru.

Kerjasama antar Ketiga daerah tersebut sangatlah menunjang untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh Aceh Besar dan Banda Aceh, Banda Aceh membutuhkan air, untuk sumber airnya ada di Aceh besar. Transportasi sekarang ada di Kuta Raja atau Banda Aceh dan Trans Koetaradja bisa menyambung destinasi-destinasi yang ada di Aceh Besar³². Sabang menjadi salah satu item tujuan wisata domestik nasional dan internasional di Aceh saat ini dapat ditunjang dengan kelengkapan infrastuktur di Kota Banda Aceh. Sementara aceh besar memiliki beragam tujuan wisata kuliner dan spot wisata sejarah dan alam yang akan melengkapi ragam tujuan para wisatawan berkunjung. Kemudian Banda Aceh memberikan fasilitas untuk Aceh besar dibidang Persampahan.³³

Selain itu dari Pemerintah Aceh Besar dalam bidang infrastruktur, memperlebar jalan digampong Lutu Laweu agar masyarakat di gampong tersebut bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari dengan mudah dan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian membangun jembatan di jalan menuju wisata air terjun Kuta Malaka, agar dapat menarik perhatian wisata untuk berkunjung. Dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Aceh memberikan bantuan usaha (program ekonomi kreatif) kepada masyarakat Putu Laweu dan pekerjaanya adalah masyarakat Putu Laweu sendiri, secara tidak langsung pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Dibidang pariwisata,

³² Video Dokumenter Youtube:Kerjasama BASAJAN, ini kata Bupati Aceh Besar

³³ Video Dokumenter Youtube: Pesona BASAJAN

Pemerintah Aceh menjadikan Wisata Pasir Putih menjadi wisata islami dengan adanya bantuan anggaran APBK Aceh Besar, dengan begitu akan menambahkan PAD (pendapatan asli daerah) Aceh Besar, kemudian dampaknya akan ada pada peningkatan ekonomi masyarakat.



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Perkembangan Kerjasama Antar Daerah BASAJAN.

Kerjasama antar wilayah BASAJAN (Banda Aceh-Sabang-Jantho/ Kabupaten Aceh Besar) dikukuhkan sejak 2008 lewat persetujuan ketiga kepala daerah. Pembentukan kerjasama BASAJAN didasari oleh kesadaran ketiga daerah untuk bisa berkembang lebih maksimal jika membangun bersama dengan memanfaatkan sistem hubungan antar wilayah. BASAJAN diharapkan bisa memicu kemajuan bersama. Visi bersama BASAJAN adalah sebagai sebuah kawasan kekuatan ekonomi baru dan berkelanjutan di tahun 2020. Untuk itu perlu disiapkan rencana kerja yang konkrit dan terarah serta koordinasi lintas instansi dan lintas wilayah serta komitmen dari ketiga daerah bagi perkembangan BASAJAN. Saat ini kerjasama BASAJAN telah menyentuh koordinasi bidang pariwisata, infrastruktur, sumber daya manusia, transportasi dan tata ruang. Secara umum, isu yang paling sering dibahas adalah bidang pariwisata. Seperti yang di nyatakan oleh bapak Pak Agustiar St M.Se (Subbid Pengembangan Infrastruktur) Bappeda Aceh Besar

“BASAJAN adalah Banda Aceh, Sabang dan Jantho, dulunya yang pertama di ikrarkan bukanlah BASAJAN tetapi SABANTO (Sabang, Banda Aceh, Jantho) sampai akhirnya diubah menjadi BASAJAN. kemudian kami juga ada lahir peraturan-peraturan bersama. kemudian juga kerjasama fokus pada kegiatan ekonomi dan pariwisata. kemudian secara geografis memang kita berada pada posisi yang sama dan memiliki karakter yang sama budaya yang tidak berbeda, sehingga untuk percepatan pembangunan itu beberapa sektor yang kita ikrarkan dalam BASAJAN ini, maka kita perlu kerjasama. artinya dalam kerjasama nanti ada regulasinya, regulasi untuk kerjasama untuk mengikat organisasi ini. ada peraturan bersamanya ada Pergubnya,

kemudian dalam pergub itu jabarannya banyak, kerjasamanya kita sejauh mana, batasannya apa, apa yang kita lakukan, dan untuk ini semua kita perlu menggali dan melihat secara dekat sistem dan progam kerjasama lebih efektif dan kita menggali sumber-sumber potensi kita yang bisa kita kerjasama. Aceh besar berperan sebagai apa. Banda Aceh sebagai apa, kota Sabang juga. Mungkin di kerjasama ini, disamping kerjasama ekonomi, kerjasama di pariwisata, di pariwisata kita juga potensi yang luar biasa, Sabang luar biasa, Aceh Besar juga karna Aceh Besar memiliki pesisir pantai yang begitu panjang, kemudian kita juga mempunyai Pulo Aceh, satu kecamatan di Pulo aceh, Banda Aceh juga dengan wisata dibidang regiliusnya, kulinernya, kemudian musium tsunaminya. Inilah yang perlu kita integrasikan semua, jadi disini nanti kita mengundang semua pelaku-pelaku pariwisata contohnya travel-travel, kemudian kita akan merancang juga paket-paket kepada manca negara maupun wisata lokal untuk menuju akses-akses yang ada di 3 kabupaten kota ini, itu untuk sektor pariwisata, sehingga dari akses yang terjadi ini munculah pertumbuhan ekonomi untuk ketiga wilayah juga. jadi dengan kehadiran mereka banyak permintaan, karna kita sebagai daerah wisata yang juga memproduksi baik itu di sektor mungkin kerajinan tangan dari masyarakat kita sendiri di 3 tiga kabupaten kota ini, kemudian makanan-makanan tradisional kita, bisa menjadi semua sebagai oleh-oleh, oleh pariwisata dan wisatawan”.³⁴

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah isu tentang vakumnya struktur kepengurusan BASAJAN, Kerjasama dengan pihak lain dan dana BASAJAN.



Gambar 4.1. Struktur BKR BASAJAN

Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh

³⁴ Wawancara dengan bapak Pak Agustiar St M.Se (Subbid Pengembangan Infrastruktur) Bappeda Aceh Besar pada tanggal 17 Desember 2019 di Bappeda Aceh Besar, Jantho

Seperti yang di nyatakan oleh bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh

*“BASAJAN dari awal pembentukannya mendapat dukungan dari Uni Eropa, World Bank, UNDP, USAID, JICA, JICS Swiss Contact, Indogerm, DED (Deutsch Entwicklung Dienst) dan GTZ. Mereka lah yang mengaktifkan Kembali BASAJAN pada tahun 2013 sampai 2014 setengah itu BKRnya hidup sekali, tapi yang menggerakannya bukan BKR tapi tenaga ahli jurusan jerman (GIZ) yang ditempatkan di 3 daerah, jadi alumni jerman itu ada dibanda aceh ada yang disabang dan di aceh besar, jadi kami yang menggerakkan, jadi aktif waktu itu, itu sampai menghasilkan kemudian Renstra Pariwisata itu alumni-alumni jerman ini yang buat, kemudian tahun 2014 meninggal pak mawardi, setelah itu ada perubahan posisi di ketiga wilayah ada juga, setelah itu sudah mulai tenggelam dia sejak 2014, puncaknya itu di tahun 2015 tetapi hanya pertemuan-pertemuan biasa enam bulan sekali atau tiga bulan sekali, seperti mati suri sampai sekarang begitu, jadi sekedar bertemu rapat tidak ada tindakan yang konkrit dari kerjasama ini, padahal banyak potensi kerjasama ini, tapal batas, transportasi ke 3 wilayah itu, kerjasama SDM dan sebagainya, ada jalan tapi gak jalan-jalan kali, kayak jalan lambat gak lari. BKR pada dasarnya di bentuk di Bappeda kota Banda Aceh, persetujuan awalnya setiap dua tahun ada pergantian secara bergilir di setiap wilayah BASAJAN, tetapi sejak 2013 sampai sekarang BKR itu berada di Banda Aceh, Alasannya adalah Banda Aceh menjadi Center. Kemudian Dewan Pengarah itu SEKDA, Dewan Pembinaanya itu Walikota, jadi jika ada pertemuan atau pelatihan yang membuat surat undangan adalah dewan pengarah karena BKR tidak jalan lagi. Sumber pembiayaan BASAJAN berasal dari HIBAH, jadi BASAJAN mempunyai rekening sendiri, hibah mempunyai peraturan yang mengatakan tidak boleh berlangsung secara kontingu, dana hibah sudah diberikan dulu pada tahun 2010, sampai sekarang masih dana hibah itu, sisa 90 juta lagi, tapi tidak bisa dipakai karena BKRnya tidak jalan, jadi yang bisa menggunakan dana hibah itu kepala BKR, masalahnya kepala BKR gak ada dari 2010 sampai sekarang, jadi BKR itu kosong”.*³⁵

Hal itu dibenarkan berdasarkan juga oleh Pak Agustiar St M.Se (Subbid Pengembangan Infrastruktur) Bappeda Aceh Besar

“Pembiayaan BASAJAN dari hibah, dari provinsi bahkan dana itu sekarang masih tersisa 80 atau 90 juta mungkin sudah berbunga sedikit karna tidak

³⁵ Wawancara dengan bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2019 di Bappeda Kota Banda Aceh

terpakai sampai sekarang, kalo sekarang dana BASAJAN dari masing-masing kabupaten kota untuk mendukung kegiatan kita, kalau pihak lain dulu ada dari NGO atau GTZ, kalau dari partai politis tidak ada, lain untuk menjalankan ditingkat rapat-rapat biaya makan dan minum koordinasi itu dari biaya APBD itu semua dari APBK dari masing-masing.³⁶

Vakumnya BASAJAN juga dibenarkan berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Faisal Azwar, S.T., M.T Kepala Bappeda Kota Sabang

“Vakumnya BASAJAN karena pemberhentian Lembaga BKRnya, kekosongan terdapat di BKR BASAJAN, belum ada penggantinya. kalau kami yang handle BASAJAN Untuk mengerjakan tugas pokok saja kita tidak sanggup, BASAJAN ini kan tugas tambahan, jadi perlu orang-orang yang lain yang membantu di BASAJAN ini bukan rangkap, kalau ini kan namanya sudah rangkap, tugas rangkap inilah yang mempersulit gerak BASAJAN, jadi pada intinya harus merekrut kembali BKR tersebut.³⁷

Tahap Kerjasama BASAJAN masih belum berjalan dengan bagus atau seperti jalan ditempat seperti yang di nyatakan oleh bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh

“Tahap program kerjasama BASAJAN. MOU masih berlangsung sampai 2020, jadi kalau di evaluasi, dilihat visi BASAJAN 2010 tu masih belum berhasil tujuannya. Jadi tahun 2020 itu mereka ada misi besar yaitu menjadi seperti sejenis kawasan pusat ekonomi di Asia Tenggara, Cuma belum jumpa sampai sekarang. Jadi kalo bisa ditanyak tahap program kerjasama sepertinya belum terlalu bagus, tidak jelas tahap kerjasamanya. Untuk sekarang, mereka lebih fokus ke pariwisata, tapi kerjasama itu biasa saja tidak ada yang mantap-mantap kali tidak ada, biasa saja jadi cuma seperti trending saja, terus brandingnya masyarakat tidak tau juga, itulah BASAJAN itu. Kami dulu pernah kesana untuk meminta dukungan dari provinsi tapi tanggapannya biasa saja, tidak ada follow up dari mereka. Jadi ini baru muncul kembali tapi itu baru di tonjolkan adalah 3 kepala daerah belum di tingkat provinsi belum jelas, bagaimana follow upnya dari provinsi.

³⁶ Wawancara dengan bapak Pak Agustiar St M.Se (Subbid Pengembangan Infrastruktur) Bappeda Aceh Besar pada tanggal 17 Desember 2019 di Bappeda Aceh Besar, Jantho

³⁷ wawancara dengan Bapak Kepala Bappeda Kota Sabang pada tanggal 23 Januari 2020 di Bappeda Kota Sabang

*Kerjasamanya tidak jelas, padahal bagus kerjasama ini. Sepertinya mereka juga bingung di apakan BASAJAN seperti menurut saya”.*³⁸

Tujuan Kegiatan selama periode 2013-2018, kegiatan BASAJAN memiliki fokus sebagai berikut:

1. Penguatan kerjasama tim teknis
2. Fokus ke bidang pariwisata dan berupaya memperluas kerjasama ke bidang-bidang lain seperti tata ruang, kerjasama sumber daya manusia, persampahan, transportasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lain-lain
3. Upaya mendapatkan dukungan pejabat teras dari ketiga daerah, terutama kepala daerah dan anggota legislatif.

4.1.1 Landasan Penyelenggaraan Kegiatan

Landasan hukum yang diacu dalam Kerjasama Regional BASAJAN adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah

³⁸ Wawancara dengan bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2019 di Bappeda Kota Banda Aceh

- e. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2009 tentang Dukungan Kepada Kerjasama Regional BASAJAN
- f. Memorandum of Understanding (MoU) Antara Tiga Kepala Daerah BASAJAN No. 17/ MOU/ 2008 dan No.134.4/ 2531/ 2008 dan No.119/7424/2008 tentang Pembentukan Kerjasama Regional BASAJAN
- g. Peraturan Bersama Tiga Kepala Daerah BASAJAN: Banda Aceh (No.18 Tahun 2009), Sabang (no.25 Tahun 2009), Aceh Besar (No.25 Tahun 2009) Tentang Pembentukan BKR BASAJAN.

4.1.2 Kegiatan BASAJAN 2013-Sekarang

Kerjasama BASAJAN (Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kota Jantho/ Kabupaten Aceh Besar) diaktifkan kembali pada Agustus 2013 dalam pertemuan tiga Kepala Bappeda BASAJAN. Setelahnya, Tim Teknis BASAJAN langsung bergerak cepat didukung oleh Tim Returning Expert dari CIM (*Center for International Migration and Development*) dari tiga wilayah BASAJAN. Koordinasi BASAJAN melibatkan berbagai instansi lintas wilayah BASAJAN yang terkait dengan bidang kerjasama. SKPD dari ketiga wilayah yang sering menjadi peserta koordinasi BASAJAN adalah Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan. Selain itu, BASAJAN juga melibatkan Bappeda Propinsi Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan lain-lain.

Di awal fase setelah pembentukan kembali, BASAJAN berfokus pada pengembangan pariwisata. Perkembangan BASAJAN pada awalnya di tahun 2014

cukup positif. Dari rangkaian rapat koordinasi dan rapat tim teknis, lahir produk-produk kegiatan seperti Rencana Strategis Pariwisata BASAJAN yang berisi tentang program-program pariwisata BASAJAN dan event kalender serta brosur pariwisata. Selain itu, juga telah ada koordinasi kegiatan promosi BASAJAN. Misal, adanya stand bersama BPKS, Banda Aceh dan Sabang di Pameran *Deep and Extreme Indonesia* kedelapan pada maret 2014 di Jakarta.

Saat ini, BASAJAN telah memperluas kerjasama ke bidang lain, yaitu transportasi massal di tingkat regional, sumber daya manusia dan tata ruang. Kerjasama ini telah dimulai dengan rapat koordinasi BASAJAN bidang transportasi massal dan tata ruang yang diadakan pada 23-24 Juni 2014 yang diadakan di Banda Aceh. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi yang berkaitan seperti Bappeda Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar serta Bappeda Aceh, Dinas PU Banda Aceh dan Aceh Besar, Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dalam rapat koordinasi BASAJAN pada 5 Desember 2014, tim teknis juga telah memulai upaya pengaktifan kembali struktur BKR (Badan Kerjasama Regional) BASAJAN agar koordinasi BASAJAN menjadi lebih maksimal dan sekretariat BASAJAN bisa dijalankan. Selama ini, penggerak utama koordinasi BASAJAN adalah tim teknis BASAJAN dari ketiga wilayah.

Pada bidang transportasi, hal yang telah dibicarakan termasuk tentang pelayanan Transkutaraja dan penyediaan fasilitas gedung parkir untuk memperlancar transportasi laut antara Banda Aceh dan Sabang. Program dalam bidang kerjasama sumber daya manusia yang telah dilaksanakan adalah kerjasama

pelatihan Teknik GIS Tingkat Dasar dan Pelatihan Database yang dikerjasamakan dengan Banda Aceh Academy. Pelatihan ini dihadiri oleh peserta dari ketiga daerah.

Koordinasi BASAJAN beberapa kali diadakan pada 2015, 2016 dan 2017 dengan cakupan pembahasan mencakup berbagai sektor. Kemudian, setelah kegiatan tersebut pertemuan selanjutnya pada 2018 sampai sekarang adalah rapat-rapat koordinasi biasa. Pada tanggal 2 April 2019 di perbaharuinya Nota Kesepahaman. Pertemuan yang pernah diadakan dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.2.
Tabel Kegiatan BASAJAN 2013-Sekarang

NO	TANGGAL	KEGIATAN KOORDINASI
1	30 Agustus 2013	Pengaktifkan Kembali BASAJAN
2	21-22 November 2013	Pengembangan perencanaan pariwisata BASAJAN
3	9 Desember 2013	Pengembangan Draft Rencana Strategi pariwisata BASAJAN 2014-2019
4	17 Januari 2014	Persetujuan Disbudpar untuk kerjasama pariwisata
5	23-24 Januari 2014	Persetujuan Draft Rencana Strategi pariwisata BASAJAN 2014-2019
6	23-24 Juni 2014	Tata ruang dan transportasi massal BASAJAN
7	5 Desember 2014	Rekomendasi penunjukkan Plt BKR BASAJAN
8	7-8 Mei 2015	SDM dan Transportasi
9	20-21 Mei 2016	Pertemuan dengan Bappeda Aceh
10	13 Oktober 2017	Koordinasi Sail Sabang
11	2 April 2019	Pertemuan ketiga kepala daerah dan Perubahan Nota Kesepahaman
12	Sekarang	Rapat koordinasi

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh

Kegiatan-kegiatan BASAJAN mendapatkan imbas tidak langsung dari perubahan-perubahan politik dan birokrasi di ketiga daerah. Pelaksanaan pilkada membuat adanya perubahan pada jabatan-jabatan penting seperti walikota serta

perubahan pada struktur SKPD di ketiga wilayah. Tidak semua pejabat-pejabat baru mengenal BASAJAN. Akibatnya, koordinasi BASAJAN yang dilakukan oleh tim teknis di wilayah masing-masing menjadi lebih sulit. Akhirnya, rapat koordinasi BASAJAN pada tahun 2017 hanya dilaksanakan sekali, yaitu pada 13 Oktober 2017 di Aula Bappeda Sabang. Rapat ini merupakan Rapat Koordinasi Kerjasama Regional BASAJAN Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Sail Sabang.

Pada tahun 2018, kegiatan BASAJAN juga vakum. Secara umum, performa BASAJAN juga sangat dipengaruhi oleh tersitanya waktu Tim Teknis oleh kegiatan rutin mereka sebagai PNS di daerah masing-masing. Terhalangnya kegiatan BASAJAN karena terbatasnya waktu Tim Teknis menunjukkan bahwa pembentukan Sekretariat Bersama BASAJAN kembali sangat menentukan bagi berjalannya BASAJAN.

4.1.3 Rencana Program BASAJAN

Kegiatan BASAJAN telah berlangsung sejak 2013. Selama ini, banyak rencana program yang telah dibicarakan oleh ketiga daerah. Beberapa rencana program yang diusulkan di forum BASAJAN telah dilaksanakan oleh SKPD di masing-masing wilayah antara lain:

- a. **Pembangunan Gedung Parkir Pelabuhan Ulee Lheue**
Pembangunan gedung parkir di Pelabuhan Ulee Lheue merupakan konsep yang lahir dari pembicaraan BASAJAN di bidang transportasi. Kebutuhan akan gedung parkir di Pelabuhan Ulee Lheue disampaikan di forum Rapat Koordinasi BASAJAN di bidang transportasi pada Juni 2014 seperti yang di

nyatakan oleh bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh

“Indikator keberhasilan BASAJAN, yang berjalan atau yang berhasil Cuma dua yaitu pembangunan parkir Ulee Lheue kemudian rute Transkutaraja (Blang Bintang dan ke Ulee Lheue)”.³⁹

Untuk menindaklanjuti permintaan ini, pada 2017, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah membangun gedung parkir di area pelabuhan Ulee Lheue. Hal ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada rapat koordinasi BASAJAN pada Oktober 2017.

b. Jalur Transkutaraja

Saat ini, perluasan jalur Transkutaraja telah mencapai Aceh Besar melalui koridor Ulee Lheue-Terminal Batoh-Bandara Soekarno Hatta. Pentingnya jalur Transkutaraja melewati Aceh Besar juga disampaikan dalam forum BASAJAN pada Juni 2014 ketika rapat BASAJAN membahas tentang tata ruang dan transportasi.

c. Kerjasama untuk Sail Sabang

Sail Sabang diadakan pada 28 November-3 Desember 2017. Even ini dihadiri oleh para pejabat Negara termasuk wakil presiden beserta perwakilan dari berbagai Negara sahabat. Sail Sabang merupakan ajang internasional sehingga pesertanya berasal dari berbagai Negara di dunia. Mengingat kesuksesan acara ini sangat dipengaruhi oleh situasi di Banda Aceh dan Sabang, tim teknis mengadakan Rapat Koordinasi Kerjasama Regional

³⁹ Wawancara dengan bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2019 di Bappeda Kota Banda Aceh

BASAJAN Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Sail Sabang pada 13 Oktober 2017 di Aula Bappeda Sabang. Rapat ini bertujuan untuk membahas peran BASAJAN dalam acara Sail Sabang. Peserta dari ketiga daerah diharapkan dapat saling berbagi informasi tentang langkah-langkah yang telah dan akan diambil dalam even tersebut. Rapat ini membahas tentang pelayanan terhadap tamu baik di wilayah Sabang maupun saat menginap di Banda Aceh, jadwal penyelenggaraan setiap sesi acara. Rapat juga memberikan informasi tentang kebutuhan transportasi laut dan udara saat acara berlangsung, pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh dan Balohan Sabang serta kenyamanan bagi peserta Sail Sabang.

d. Kerjasama Sumber Daya Manusia

Selain itu, BASAJAN juga mengadakan diklat Kerjasama SDM “Diklat Teknis GIS Tingkat Dasar” pada 31 Agustus-9 September 2016 bertempat di Aula BKPP Kota Banda Aceh. Selain itu, juga pernah diadakan pelatihan database di Banda Aceh Academy. Pelatihan ini merupakan program kerjasama Banda Aceh Academy (BAA) bekerjasama dengan UPTB GIS Bappeda Kota Banda Aceh. Selain utusan-utusan SKPD di Banda Aceh, dalam kegiatan ini juga diundang perwakilan dari Sabang dan Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama di bidang SDM antara ketiga daerah.

Selain program diatas ada juga program pengumpulan data dan informasi, penyusunan program, kunjungan kerja, peran serta dalam event dan kegiatan, Draft Rencana Strategis BKR BASAJAN, Brosur Pariwisata,

Kalender Event, tingkat dasar, Promosi dan Publikasi, Pameran, Website BASAJAN dan lain sebagainya

4.1.4 Objek Wisata Andalan BASAJAN

Wilayah BASAJAN memiliki lokasi wisata yang tersebar. wilayah ini memiliki keberagaman dan potensi wisata yang sangat kaya dan bervariasi. Banda Aceh memiliki potensi kuat di bidang wisata religi dan histori. Sabang memiliki potensi pariwisata luar biasa di bidang pariwisata bahari. Sedangkan Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi pariwisata yang besar di bidang pariwisata alam.

4.1.4.1 Objek Wisata Di Kota Banda Aceh

1. Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Masjid Baiturrahman merupakan salah satu mesjid terindah di Asia Tenggara dan salah satu mesjid tertua di Indonesia. Mesjid ini merupakan kebanggaan, saksi bisu sejarah serta simbol religius, keberanian dan nasionalisme rakyat Aceh. Mesjid ini terletak di pusat kota Banda Aceh. Mesjid ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Saat itu, mesjid ini merupakan pusat pendidikan ilmu agama di Nusantara yang dikunjungi oleh banyak pelajar dari Nusantara, bahkan dari Arab, Turki, India, dan Parsi. Mesjid ini juga menjadi markas pertahanan rakyat Aceh ketika berperang dengan Belanda (1873-1904). Mesjid ini dibakar habis oleh tentara Belanda ketika Perang Aceh pada 1873. Namun, pada saat itu Mayjen Khohler tewas di pekarangan Masjid Raya. Sebuah monumen kecil dibangun untuk mengenang peristiwa tersebut. Enam tahun kemudian, untuk meredam kemarahan rakyat

Aceh, pihak Belanda melalui Gubernur Jenderal Van Lansnerge membangun kembali Masjid Raya pada tahun 1879. Hingga saat ini Masjid Raya telah mengalami lima kali renovasi dan perluasan (1879-1993). Masjid ini memiliki tujuh kubah, empat menara dan satu menara induk. Ruangan dalam berlantai marmer buatan Italia, luasnya mencapai 4.760 m² dan terasa sangat sejuk apabila berada di dalam ruangan Masjid. Masjid ini dapat menampung hingga 9.000 jamaah. Di halaman depan masjid terdapat sebuah kolam besar, rerumputan yang tertata rapi dengan tanaman hias

2. Pinto Khop

Pinto Khop dibangun pada masa Pemerintah Sultan Iskandar Muda. Pinto gerbang berbentuk kubah ini menghubungkan istana dengan taman putroe phang. Disinilah tempat beristirahat Putri Phang, permaisuri Sultan Iskandar Muda. Di tempat ini dibangun sebuah perpustakaan tempat Sang Sultan dan Sang Permaisuri sering menghabiskan waktu dengan membaca.

3. Gunongan

Gunongan merupakan sebuah objek wisata yang merepresentasikan simbol cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Phang (Putroe Phang) yang berasal dari Pahang, Malaysia. Putroe Phang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala Pemerintah sehingga ia selalu teringat dengan kampung halamannya di Pahang. Untuk itulah, Sang Sultan membangun sebuah gunung kecil (Gunongan) sebagai miniatur perbukitan yang mengelilingi istana Putroe Phang di Pahang. Hal ini sangat membahagiakan sang permaisuri. Gunongan

menjadi tempat favorit Sang Permaisuri. Gunungan terletak di Jalan Teuku Umar berhadapan dengan lokasi perkuburan serdadu Belanda (Kerkoff). Bangunan ini didirikan pada masa Pemerintah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) pada abad ke-17. Bangunan Gunungan tidak terlalu besar, bersegi enam, berbentuk seperti bunga dan bertingkat tiga dengan tingkat utamanya sebuah mahkota tiang yang berdiri tegak. Pada dindingnya ada sebuah pintu masuk berukuran rendah yang selalu dalam keadaan terkunci. Dari lorong pintu itu ada sebuah tangga menuju ke tingkat tiga Gunungan.

4. Kapal Apung Lampulo

Wisata ini tetap dipertahankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengenang Musibah Tsunami yang melanda Kota Banda Aceh. Sebuah kapal yang terbawa gelombang tsunami dan terdampar di perumahan penduduk di kawasan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam.

5. Makam Sultan Iskandar Muda

Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh penting dalam sejarah Aceh. Aceh mengalami masa kejayaan, kala Sultan memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1607-1636. Ia mampu menempatkan kerajaan Islam Aceh di peringkat kelima di antara kerajaan terbesar Islam di dunia pada abad ke 16. Saat itu Banda Aceh yang merupakan pusat Kerajaan Aceh, menjadi kawasan bandar perniagaan yang ramai karena berhubungan dagang dengan dunia internasional, terutama kawasan Nusantara di mana Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal niaga asing untuk mengangkut hasil bumi Asia ke Eropa.

6. Gerbang Peutjoet Kerkoff

Kerkoff berasal dari bahasa Belanda yang berarti kuburan, sedangkan Peutjoet atau asal kata dari Pocut (putra kesayangan) Sultan Iskandar Muda yang dihukum oleh ayahnya sendiri (Sultan Iskandar Muda) karena melakukan kesalahan fatal dan dimakamkan di tengah-tengah perkuburan ini. Pada relief dinding gerbang makam tertulis nama-nama serdadu Belanda yang meninggal dalam pertempuran dengan masyarakat Aceh (setiap relief ada 30 nama); daerah pertempuran, seperti di Sigli, Moekim, Tjot Basetoel, Lambari en Teunom, Kandang, Toeanko, Lambesoi, Koewala, Tjot Rang - Pajaoe, Lepong Ara, Oleh Karang Dango, dan Samalanga); dan tahun meninggal para serdadu (1873-1910). Sekitar 2200 tentara Belanda termasuk 4 jendralnya sejak tahun 1883 hingga 1940an dikuburkan di sini. Di antara para serdadu Belanda tersebut ada beberapa nama prajurit Marsose yang berasal dari Ambon, Manado dan Jawa. Para prajurit Marsose yang berasal dari Jawa ditandai dengan identitas IF (inlander fuselier) di belakang namanya, prajurit dari Ambon dengan tanda AMB, prajurit dari Manado dengan tanda MND, dan serdadu Belanda dengan tanda EF/ F. Art.

7. Masjid Baiturrahim Ulee Lheue

Masjid Baiturrahim ini merupakan satusatunya bangunan dipinggir Pantai Ulee Lheue yang bertahan dan tetap berdiri kokoh pada saat Tsunami menerjang Kota Banda Aceh pada hari minggu tanggal 24 Desember 2004. Bangunan lain yang berada di sekitarnya luluh lantak di hantam gelombang tsunami.

8. Kuburan Massal Ulee Lheue

Wisata ini terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda. Sebelum tsunami, di area ini terdapat Rumah Sakit Umum Meuraxa. Ketika tsunami melanda Kota Banda Aceh, Rumah Sakit tersebut rusak parah. Halamannya dijadikan pemakaman massal bagi korban Tsunami. Rumah Sakit Meuraxa sendiri sekarang telah direlokasi ke Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

9. Kapal PLTD Apung

Pada masa konflik, banyak menara transmisi listrik dari Sumatera Utara ke Aceh ditebang oleh pihak-pihak pemberontak. Hal ini menyebabkan masalah kekurangan listrik di Banda Aceh. Oleh karena itu, PLN menempatkan Kapal Generator Listrik untuk mensuplai kebutuhan listrik di Banda Aceh melalui jalur laut. Pada hari minggu pagi tanggal 26 Desember 2004, gelombang Tsunami menghempas Kapal tersebut sejauh lebih kurang 3KM dari pesisir pantai. Banyak objek seperti perumahan penduduk yang hancur telah dibangun kembali. Oleh karena itu, keberadaan kapal besar di tengah perumahan ini sangat membantu untuk mendapatkan gambaran betapa dahsyatnya tsunami tersebut.

10. Replika Pesawat Seulawah RI 1 di Blang Padang

Pesawat Seulawah yang dikenal RI-1 dan RI-2 merupakan bukti nyata dukungan yang diberikan masyarakat Aceh untuk Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pesawat Seulawah adalah cikal bakal Maskapai Garuda Indonesia Airways. Rakyat Aceh mengumpulkan harta

pribadi masyarakat dan saudagar Aceh sehingga Presiden Soekarno menyebut "Daerah Aceh adalah Daerah Modal bagi Republik Indonesia, dan melalui perjuangan rakyat Aceh seluruh Wilayah Republik Indonesia dapat direbut kembali". Pesawat Seulawah dibeli dengan harga US\$120.000 dengan kurs pada saat itu atau kira-kira 25 Kg emas. Untuk mengenang jasa masyarakat Aceh tersebut, dibuat replika pesawat Seulawah yang berada di Lapangan Blang Padang Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

11. Taman Sari/ Taman Bustanussalatin

Taman Sari merupakan tempat bermain yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Lokasinya berada tidak jauh dari Mesjid Raya Kota Banda Aceh. Taman Sari merupakan salah satu tempat favorit di Kota Banda Aceh dengan fasilitas yang tersedia antara lain : mempunyai taman yang luas dan tertata rapi dengan aneka permainan gratis bagi anak-anak dan juga tersedia hot spot gratis. Tempat ini juga didukung oleh bangunan gedung untuk menunjang tempat ini sebagai pusat kegiatan masyarakat.

12. Museum Tsunami

Museum Tsunami Aceh adalah sebuah museum yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami Samudera Hindia 2004 sekaligus pusat pendidikan dan tempat perlindungan darurat andai tsunami terjadi lagi. Museum tsunami Aceh dirancang oleh arsitek asal Indonesia, Ridwan Kamil. Museum ini merupakan sebuah struktur empat lantai dengan luas 2.500 m² yang dinding lengkungnya ditutupi relief geometris. Pengunjung masuk melalui lorong sempit dan gelap di antara dua

dinding air yang tinggi untuk menciptakan kembali suasana dan kepanikan saat tsunami. Dinding museum dihiasi gambar orang-orang menari Saman, sebuah makna simbolis terhadap kekuatan, disiplin dan kepercayaan rakyat Aceh.

13. Taman Wisata Krueng Aceh

Krueng Aceh adalah sungai yang membelah Kota Banda Aceh. Airnya yang cukup bersih menjadikan berpotensi untuk dijadikan objek wisata dengan konsep panorama waterfront yang menawarkan suasana tenang dan nyaman. Lokasi Waterfront City di Kota Banda Aceh meliputi kawasan Gampong Keudah, Gampong Kuta Alam dan Kawasan Gampong Lamgugob. Di area waterfront ini, terdapat tempat rekreasi keluarga di Keudah dan Kuta Alam serta wisata air di jembatan Lamnyong. Selain itu, juga tersedia jogging track dekat jembatan Peunayong. Bagi komunitas pecinta lingkungan, juga ada tempat pembibitan benih tanaman di Kampung Bar.

4.1.4.2 Objek Wisata Di Sabang

1. Tugu KM 0 Indonesia

Pulau Weh dengan ibukota Sabang adalah bagian paling Barat Indonesia. Untuk menandakannya, pemerintah membangun Tugu Kilometer 0 Indonesia.

2. Tugu Sabang Merauke

Tugu ini merupakan salah satu tugu kembar yang berada Sabang dan di Sota, Merauke, kota paling timur Indonesia. Tugu ini berada di pusat kota Sabang,

tepatnya di depan kantor Walikota Sabang dengan pemandangan langsung teluk Sabang.

3. Pantai Anoi Itam

Pantai Anoi Itam berjarak 13 menit dari kota Sabang. Pantai ini memiliki garis Pantai yang indah dan bukit-bukit yang landai di akhiri dengan pantai berpasir hitam. Pantai berpasir hitam inilah yang menjadi asal usul nama daerah ini. Di atas bukit didekatnya, terdapat sebuah benteng peninggalan Jepang. Dari benteng ini, terlihat air jernih yang cantik beserta ikan-ikan karang.

4. Air Terjun Pria Laot

Air terjun Pria Laot terletak di desa Pria Laot, tepatnya di Gunung Sarung Keris. Keindahan objek wisata air terjun ini diperkaya dengan banyaknya kupu-kupu yang berwarna warni.

5. Pulau Rubiah

Pulau Rubiah dikelilingi oleh taman bawah laut yang dilindungi. Taman laut ini terkenal dengan batu karang yang indah. Tempat ini sangat cocok untuk snorkling dan diving.

6. Danau Aneuk Laot

Danau Aneuk Laot merupakan danau terbesar di Pulau Weh yang memiliki panorama yang indah. Danau ini juga merupakan sumber mata air penduduk daerah ini.

7. Pantai Ujong Kareung

Pantai Ujung Kareung merupakan pantai berkarang yang memiliki banyak terumbu karang yang indah, ikan-ikan karang, dan juga bintang laut yang berada dekat pantai.

4.1.4.3 Objek Wisata Di Kabupaten Aceh Besar

1. Pemandian Air Panas Ie Seuum

Pemandian Air Panas Desa Ie Seuum Krueng Raya berada di Kecamatan Masjid Raya, 45 kilometer atau sekitar kurang lebih satu jam perjalanan dari Kota Banda Aceh. Air Panas tersebut bersumber langsung dari pegunungan Seulawah. Air Panas Ie Seuum bermanfaat bagi kesehatan, berkhasiat mengobati penyakit kulit, terapi penyembuhan rematik, gangguan syaraf dan tulang serta penyembuhan kelumpuhan yang diakibatkan oleh penyakit darah tinggi atau stroke. Selain itu, pengunjung dapat menikmati panorama aliran air panas di sekitar kaki bukit yang berbentuk saluran-saluran kecil yang mengeluarkan asap.

2. Waduk Keuliling

Waduk Keuliling merupakan tempat wisata buatan. Waduk ini berada di Kecamatan Kuta Cot Glee (sebelumnya Kecamatan Indrapuri) Kabupaten Aceh Besar. Ia merupakan salah satu waduk terindah di Aceh. Jaraknya sekitar 30 menit dari Kota Banda Aceh. Di waduk ini juga tersedia rakit bagi wisatawan yang ingin menuju sebuah pulau buatan di tengah Waduk.

3. Pantai Ujong Batee

Objek Wisata Pantai Ujong Batee berada di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Lokasinya di jalur Banda Aceh –Krueng Raya. Letaknya hanya 17 kilometer atau 20 menit dari Kota Banda Aceh. Pengunjung dapat menikmati keindahan Pantai Ujong Batee sambil bersantai di bawah pohon-pohon cemara. Pantai Ujong Batee memiliki pasir hitam yang indah dan cocok untuk terapi penyakit kelumpuhan, penyakit tulang dan kesehatan kulit. Sekitar Pantai Ujong Batee juga terdapat beberapa objek wisata sejarah berupa peninggalan sisa-sisa Benteng Indrapatra yang berumur ratusan tahun.

4. Pantai Pasir Putih Lhok Mee Lamreh

Pantai bernuansa unik yang dipercantik dengan pepohonan di permukaan laut ini adalah lokasi wisata yang sedang digalakkan. Bukit mengitari pantai pasir putihnya yang luas. Turis bisa menikmati kuliner khas Aceh dengan air kelapa segar.

5. Pantai Babah Kuala Lhoknga

Pantai babah Kuala Lhoknga berjarak hanya 20 menit atau sejauh 17 kilometer dari Banda Aceh. Pantainya berpasir putih. Pantai ini cocok untuk lokasi permainan papan selancar (surfing). Didekat pantai ini juga terdapat lapangan Golf.

6. Pantai Pulo Kapoek (Pantai Cemara) Lhoknga

Kecamatan Lhoknga berada di jalan lintas Banda Aceh---Meulaboh. Jaraknya hanya 17 kilometer atau 20 menit perjalanan dari Banda Aceh. Pantai ini

memiliki pasir putih dan laut biru yang eksotis. Cocok bagi wisatawan yang ingin beristirahat sejenak sambil menanti matahari tenggelam. Selain itu, wisatawan juga bisa menguji adrenalin dengan barana boat dan papan selancar (surfing).

7. Pantai Lampu'uk Lhoknga

Pantai Lampuuk berada di jalur lintas Banda Aceh-Melaboh, hanya 17 kilometer atau 20 menit perjalanan dari Kota Banda Aceh. Pasirnya putih dan lautnya memancarkan warna biru yang eksotis. Tempat ini cocok untuk menyelam, memancing, dan aktifitas yang menegangkan seperti mengendarai banana Boat dan papan selancar (surfing). Ikan bakar di pantai ini dikenal lezat.

8. Waduk Lembah Brayeun

Lembah Brayeung berada di pinggiran alami Desa Brayeung, Leupung, sekitar 20 kilometer dari Banda Aceh. Kawasan ini terkenal bukan saja karena waduk Brayeun yang seperti kolam renang raksasa, tetapi juga karena pesona lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dengan hutan yang masih alami.

9. Air Terjun Kuta Malaka

Air terjun Kuta Malaka berjarak 30 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh. Air terjun ini sangat indah dan natural serta memiliki udara yang sejuk dan panorama alam yang mempesona. Selain menjadi tempat rekreasi, objek wisata ini juga melayani kepentingan irigasi di sekitar Kuta Malaka. Objek wisata ini bisa dicapai dengan mendaki bukit dan gunung.

10. Mercusuar William Toren

Menara mercusuar ini adalah peninggalan Pemerintah kolonial belanda yang di bangun pada tahun 1875. Diberi nama William Toren sebagai penghormatan bagi raja Belanda, Wiliam III. Mercusuar ini berupa menara setinggi 10 meter yang di pancangkan di atas bukit desa Ujung Puneu, pulau Breueh. Belanda membangun 3 menara identik di lokasi yang berbeda –yakni pulau Aceh, Belanda dan Karibia.

4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Progam Kerjasama Pembangunan Antar Daerah BASAJAN.

Dalam periode 2013-2018, pelaksanaan kegiatan BASAJAN mendapatkan berbagai hambatan dan tantangan. Kegiatan BASAJAN mendapatkan imbas tidak langsung dari berbagai faktor internal dan eksternal. Tim teknis BASAJAN merupakan PNS di pemerintah daerah masing-masing sehingga waktu banyak tersita untuk kegiatan rutin PNS. Hal ini merupakan dampak dari belum terbentuknya Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN yang diisi oleh tenaga profesional. Dari performa BASAJAN selama ini, terlihat bahwa kehadiran tenaga professional sangat menentukan keberhasilan kerjasama regional. Selain itu, ketiga daerah sering mengalami pergantian kepala-kepala SKPD yang merupakan motor penggerak kerjasama regional BASAJAN selama ini. Hal ini ikut menyebabkan perubahan pada komposisi tim teknis dan menghambat koordinasi serta efektifitas komunikasi tim. Beberapa anggota tim teknis juga telah ditempatkan di SKPD lain sehingga tim teknis yang terlibat dalam pendirian BASAJAN terus berkurang.

Seperti yang dibenarkan oleh bapak Pak Agustiar St M.Se (Subbid Pengembangan Infrastruktur) Bappeda Aceh Besar

*“Sulit menetapkan jadwal rapat karna kesibukan masing-masing daerah, mempertemukan ketiga kepala daerah itu juga hal yang tidak mudah, kemudian Bappeda mempunyai tugas wajib yang harus diselesaikan, dan BASAJAN itu adalah tugas tambahan”.*⁴⁰

Yang di benarkan juga oleh Bapak Kepala Bappeda Kota Sabang

*“Hambatan BASAJAN berada pada kelembagaannya, kelembagaannya yang tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya. Makanya kita merancang koordinasi yang baru, sumber daya manusia masih kurang, belum ada semacam SOP, dukungan dari provinsi masih kurang bagaimana kita mengurus orang, diri sendiri aja belum kita urus. Kemudian masih koordinasi saja, belum terbentuknya sebuah PKS (perjanjian kerjasama) yang konkrit, kalau MOU dan NOTA BASAJAN belum terlalu kuat. BASAJAN masih saling sharing saja”.*⁴¹

Seperti yang di nyatakan juga oleh bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh

“Pertama, kurang dukungan dari kepala daerah, tapi sekarang ini teratasilah mereka sudah mendatangi MOU lagi, tapi apakah Cuma sekedar tanda tangan.

***Kedua,** pergantian personalia di dinas, terutama di dinas-dinas yang terikat dengan BASAJAN (Bappeda, DISPAR) karena Bappeda yang mengkoordinasi dan pergantian di dinas lain juga berpengaruh, karena setiap pergantian kepala dinas baru akan keluar kebijakan baru lagi.*

***Ketiga,** dukungan oleh Provinsi kurang kuat, konkritnya belum ada sampai sekarang, konkritnya bentuk kerjasamanya, dulu waktu kami bawak kesana ketemu langsung ke asisten berapa di Bappeda Aceh, gak ada solusi konkrit juga dari mereka, bagaimana menghidupkan BASAJAN ini, padahal masih lading Pergubnya. Gaung BASAJAN jadi yang tahu hanya di bappeda, Dispar mengetahui sedikit, kemudian dinas yg lain tahu sedikit.*

***Keempat,** peraturannya kurang bagus. Kerjasama itu banyak yang gagal di Indonesia yang sangat berhasil itu Kartamantul yang berada di Yogyakarta. BASAJAN dulu belajar dari Kartamantul ketika awal berdiri. Jabodetabek saya tidak tau berhasil atau tidak. Dulu ada mau dibuat didaerah Aceh Pidie,*

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Pak Agustiar St M.Se (Subbid Pengembangan Infrastruktur) Bappeda Aceh Besar pada tanggal 17 Desember 2019 di Bappeda Aceh Besar, Jantho

⁴¹ wawancara dengan Bapak Kepala Bappeda Kota Sabang pada tanggal 23 Januari 2020 di Bappeda Kota Sabang

Pidie Jaya dan Bireuen itu tidak berhasil juga. Peraturannya kurang bagus, ada peraturan tentang petunjuk teknik kerjasama regional kemudian yang dari nasionalnya peraturannya kurang bagus, jadi daerah pun banyak yang tidak paham, didaerah banyak yang tidak mengerti apa esensi dari kerjasama daerah. Esensi kerjasama itu untuk tumbuh bersama tapi kan diantara daerah-daerah ini pun ada masalah include eclude sendiri. Kerjasama di Jerman bagus sekali, tapi kalo dikita kurang bagus, kurang untuk bisa bekerja.

Kelima, yang paling intiya BKR. Karena mereka performanya kurang bagus dinilai oleh ketiga kepala daerah tidak mendukung kelanjutan kerjasamanya makanya mereka berhenti di 2010, setelah itu tidak terbentuk lagi BKR. Tenaga alumni jerman tidak bisa menggantikan posisi BKR karena BKR itu ada alumni straktif itu sesuatu yang tidak bisa kami lakukan, kami hanya bisa memberikan ide tetapi pada bidang adminitratif tidak bisa. tetapi memang akhirnya baru disadari sepertinya harus bentuk BKR lagi, isinya orang professional tambah orang dari PNS dari ketiga daerah, tetapi interpresinya belum ada sampai sekarang. Kesepakatan yang tidak dijalan kan.

Keenam, Regulasi-regulasi nasional sepertinya kurang kuat menurut saya, kurang kasih petunjuk. Peraturan-peraturan tentang finansial/keuangan, pemberian hibah, bentuk dukungan finansial apa yang bisa diberikan oleh daerah ke badan kerjasama juga belum juga. Di pemerintah menganggap BASAJAN itu tidak ada karena tidak ada produk fisiknya, mereka menganggap tidak ada dampaknya, padahal diKartamantul mereka gitu juga, mereka koordinasi juga tapi memang ada program yang dihasilkan dari koordinasi kerjasama mereka itu ada produk fisik, seperti yang nampak juga Parking Ulee Lheue, kalo di Kartamantul ada banyak.⁴²

Tahun 2017 merupakan tahun politik untuk menghadapi pilkada. Ketiga kepala daerah terpilih merupakan kepala daerah baru yang tidak terlibat dalam pendirian BASAJAN. Hal ini menyebabkan tim teknis harus kembali memperkenalkan BASAJAN pada pimpinan daerah yang baru. Hal ini merupakan tantangan tersendiri karena tidak semua kepala daerah familiar dengan konsep kerjasama regional. Hal ini berdampak pada sulitnya mengangkat isu BASAJAN kepada kepala daerah baru yang dukungannya sangat menentukan kelanjutan

⁴² Wawancara dengan bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2019 di Bappeda Kota Banda Aceh

kerjasama regional BASAJAN. Pada periode 2013-2018, upaya tim untuk mengumpulkan ketiga kepala daerah dan mendapat dukungan ketiga kepala daerah belum membuahkan hasil. Pengenalan ini cukup penting karena Tim Teknis berupaya agar ada komitmen dari ketiga kepala daerah yang baru untuk mendukung BASAJAN. Selain itu, BASAJAN sampai saat ini belum mampu mendapatkan dukungan DPRD ketiga wilayah untuk menjamin dukungan anggaran hibah untuk operasional BKR BASAJAN.

Berdasarkan analisis terhadap situasi BASAJAN pada periode 2013-2018, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali gaung BASAJAN sebagai berikut:

1. Memperkenalkan BASAJAN pada Kepala Daerah Baru dan Membuat Komitmen Ketiga Kepala Daerah BASAJAN

Salah satu upaya utama yang harus dilakukan untuk membangun kembali BASAJAN adalah dukungan dari ketiga kepala daerah. Untuk itu, gaung BASAJAN perlu diberikan bagi kepada daerah baru. Untuk memastikan dukungan politis, diperlukan pernyataan komitmen dari tiga kepala daerah. Dukungan pemimpin daerah akan sangat mempengaruhi motivasi dan ruang gerak tim.

2. Kerjasama dianggap sebagai kebutuhan bersama apabila masing-masing pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Oleh karena itu, identifikasi untuk menemukan kesamaan isu dan permasalahan pembangunan diantara anggota menjadi hal yang sangat berguna dan sangat penting untuk dilakukan.

3. Adanya prinsip saling menguntungkan bagi semua pihak kerjasama. Prinsip saling menguntungkan menggambarkan bahwa dalam bekerjasama setiap daerah dapat menarik keuntungan atau manfaat dari adanya Kerjasama tersebut. Namun tidak berarti bahwa setiap daerah harus mendapatkan bentuk keuntungan yang seragam.
4. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Pergub dukungan BASAJAN telah ada. Namun sampai saat ini, dukungan yang konkrit belum terlihat. Hal ini bisa juga diakibatkan oleh belum terbentuknya lembaga BKR yang memegang peranan penting dalam koordinasi. Berdasarkan PP 28 Tahun 2018, peran Pemerintah Propinsi sangat penting untuk kelancaran kerjasama antardaerah lintas kabupaten/ kota. Dukungan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi terhadap Kerjasama sangat diperlukan.
5. Pengaktifan embali Sekretariat Bersama BASAJAN.
Pengaktifan kembali sekretariat bersama BASAJAN memegang peranan sangat penting karena sangat menentukan keberlanjutan BASAJAN. Selama ini, tugas ini sedikit banyak ditangani bersama oleh tim teknis dan tenaga ahli. Namun, cakupan tugas menjadi terbatas. Administrasi resmi kesekretariatan tidak bisa berjalan maksimal dan tim teknis memiliki kesibukan masing-masing sebagai PNS. Oleh karena itu, kesekretariatan BASAJAN harus diaktifkan kembali dengan merekrut tenaga professional seperti yang di nyatakan oleh bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh

“Jadi memang strategi utama yang harus di ubah dalam BASAJAN itu sebenarnya BKR, merekrut kembali BKR, jadi ada yang bilang BKR

yang lama itu gak terlalu berhasil karena tidak bagus tuntunannya, fungsinya kurang bagus BKR yang lama tu, jadi gak terlalu berjalan, jadi 3 kepala daerah itu tidak puas kinerja BKR, sedikit demi sedikit tidak mendukung lagi kelanjutan BKR maka berhenti pada tahun 2010 Cuma sekitas 6 bulan mereka jalan, karna kinerjanya dianggap tidak bagus. Kemudian dari anggota Dewan pun ada yang kritis kepada BKR.⁴³

Berdasarkan PP 28 Tahun 2018, Sekretariat kerjasama dapat dibentuk dalam melaksanakan kerjasama wajib dengan ketentuan kerjasama wajib tersebut:

- a) Dilakukan secara terus menerus
- b) Memiliki kompleksitas tinggi;
- c) Jangka waktu kerjasama paling singkat 5 (lima) tahun.

Sekretariat kerjasama ini juga bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan Kerjasama Antardaerah.

Pergantian lokasi sekretariat BASAJAN sesuai nota kesepahaman juga perlu dilakukan oleh kesadaran akan adanya BASAJAN di setiap daerah meningkat.

6. Mendapatkan dukungan dari DPRD BASAJAN.

Dukungan dari ketiga DPRD sangat berpengaruh pada tersedianya anggaran hibah untuk mendukung berjalannya BKR. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018, pendanaan sekretariat kerjasama dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerjasama. Oleh karena itu, dukungan DPRD sangat penting. Namun, sejak 2013 hingga

⁴³ Wawancara dengan bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional Bappeda Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2019 di Bappeda Kota Banda Aceh

sampai saat ini dukungan DPRD untuk BASAJAN belum konkrit. Hal ini bisa saja dipicu oleh belum efektifnya BASAJAN hingga saat ini.

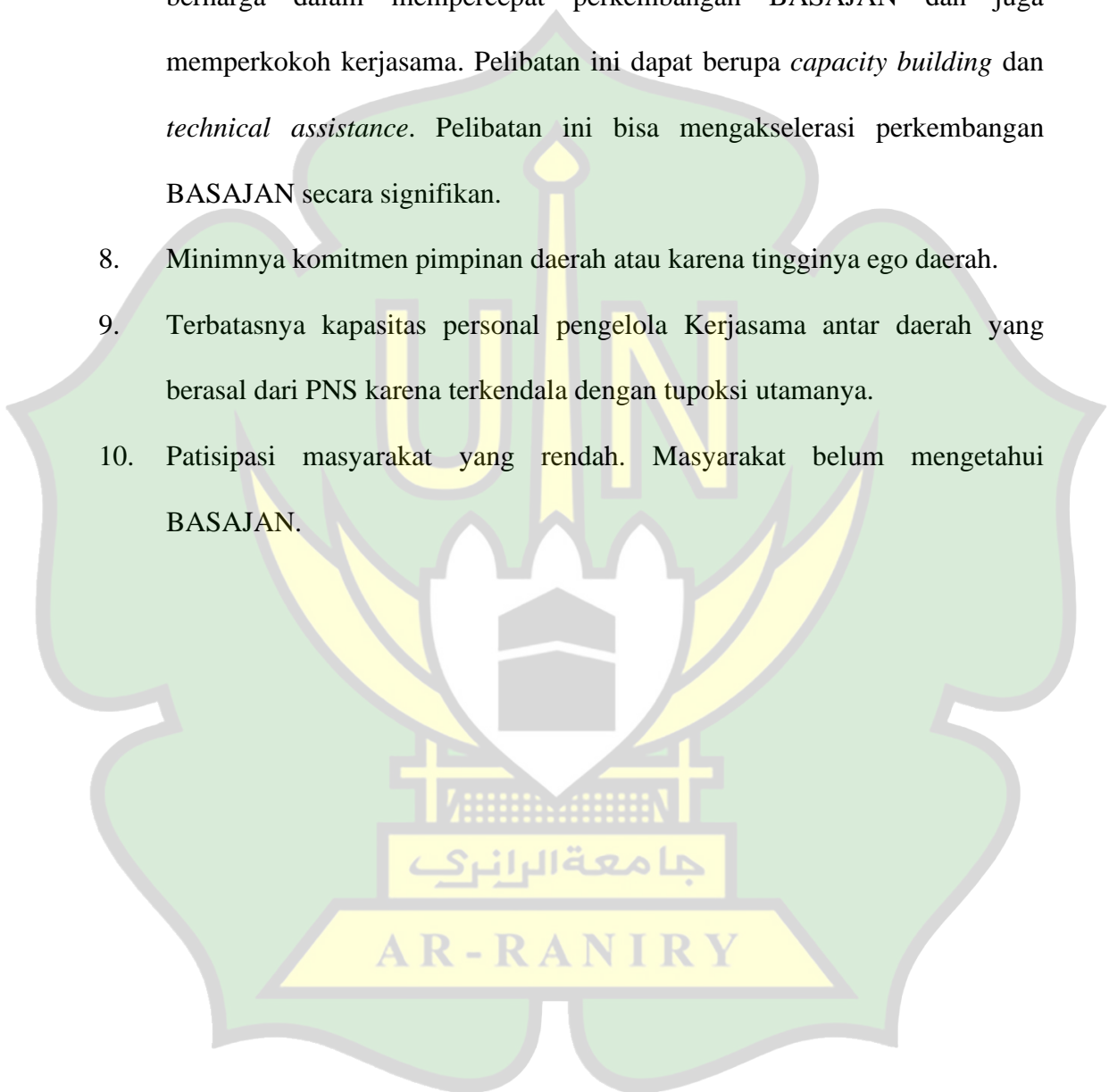
7. Pelibatan Lembaga Eksternal

Pelibatan lembaga eksternal dalam mendukung BASAJAN bisa sangat berharga dalam mempercepat perkembangan BASAJAN dan juga memperkokoh kerjasama. Pelibatan ini dapat berupa *capacity building* dan *technical assistance*. Pelibatan ini bisa mengakselerasi perkembangan BASAJAN secara signifikan.

8. Minimnya komitmen pimpinan daerah atau karena tingginya ego daerah.

9. Terbatasnya kapasitas personal pengelola Kerjasama antar daerah yang berasal dari PNS karena terkendala dengan tupoksi utamanya.

10. Patisipasi masyarakat yang rendah. Masyarakat belum mengetahui BASAJAN.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan kerjasama antar daerah BASAJAN yang dikukuh dari tahun 2008 sampai sekarang masih kurang maksimal karena performa dan kinerja BKR kurang maksimal. Banyak sekali hambatan dan permasalahan di lapangan yang sulit untuk diimplementasikan. Program BASAJAN yang sangat di fokuskan adalah bidang pariwisata, selain itu Kerjasama BASAJAN saat ini telah menyentuh koordinasi bidang infrastruktur, sumber daya manusia, transportasi dan tata ruang, meskipun saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor penghambat dalam kerjasama antar daerah BASAJAN adalah pengaktifkan kembali sekretariat bersama (BKR). BKR harus merekrut kembali yang isinya orang-orang professional di tambah orang dari PNS dari ketiga daerah, tetapi interpresinya belum ada sampai sekarang. Kemudian sumber daya manusia masih kurang, belum ada, peraturannya kurang bagus, sulit mempertemukan tiga kepala daerah, dukungan dari provinsi masih kurang dan BASAJAN masih di *handle* oleh tim teknis sebagai PNS di BAPPEDA masing-masing sedangkan mereka punya kesibukan sendiri untuk mengurus BAPPEDA. Kedepan tenaga kerja professional dan ahli dibidang BKR menjadi sesuatu yang sangat diperlukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Untuk kedepannya diharapkan kegiatan Kerjasama antar wilayah BASAJAN dapat berjalan lebih terarah dan fokus, mengingat kerjasama ini sangatlah bagus. Banyak sekali potensi yang ada didalamnya untuk membentuk segitiga daerah yang saling menguntungkan dan saling bekerjasama untuk satu tujuan yang ingin dicapai
2. Tekait dengan banyaknya faktor penghambat yang ada di dalam kerjasama BASAJAN maka sebaiknya perlu upaya untuk mengatasi faktor tersebut di antaranya BKR di aktifkan Kembali, Pemerintah harus mendukung kerjasama BASAJAN ini dan untuk kedepan diharapkan Kerjasama BASAJAN dapat berjalan lebih terarah dan fokus sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam kerjasama wilayah dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anak Agung Putu Agung. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Hasan Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalaluddin Rahmat. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Rosda Karya.
- Janu Ismadi. 2019. *Kerjasama Luar Negeri Indonesia*. Tangerang: Delta Edukasi Prima.
- Nasution. 2011. *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rianto Adi. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal atau Skripsi:

- Budhi Setianingsih, dkk, Efektifitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAL). (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11, Hal. 1930. Diakses pada 18 Juli 2018.
- Dika Fajri Fiisabilillah, Dkk, *Peran Modal Sosial Dalam Kerjasama Antardaerah Kartamantul*, *Mimbar*, Vol. 30, Nomor 2, Desember 2004, Hlm. 217. Diakses Pada 10 April 2018.
- Siti Marhamah dan Abd. Jamal "Analisis Ketimpangan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Kawasan BASAJAN". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syiah Kuala*. Vol 1 No 1, Banda Aceh 2016, Hal 246-253.
- Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Apatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda, *Kerjasama Antarprovinsi Untuk Pembangunan Regional Kalimantan Yang Terintegrasi*, Vol 8 No. 1, 2012 diakses pada 16-04-2018
- Teguh Budi Prasetya. 2013. Potret Kerjasama Antardaerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Maksipreneur* Vol. I. No. 2. hlm 1 – 16

Yeremias T. Keban. Penulis adalah Dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, dosen pada MAP, MPKD dan MEP UGM di Yogyakarta, dan konsultan capacity building for local government, human resource management, dan poverty alleviation pada beberapa Program Pemerintah sejak 1999.

Peraturan Perundang-Undangan:

Nota Kesepahaman Nomor 17/MOU/2008, dan Nomor 134.4/2531/2008 dan Nomor 119/7424/2008 Tentang Kerjasama Regional Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar (BASAJAN)

Peraturan Bersama (Perma) Walikota Banda Aceh, Sabang dan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2009 (Banda Aceh), Nomor 25 Tahun 2009 (Sabang) dan Nomor 25 Tahun 2009 (Aceh Besar) tentang Pembentukan Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN Walikota Banda Aceh, Sabang dan Bupati Aceh Besar

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Website

Bappeda Kota Banda Aceh, BASAJAN. Diakses tanggal 3 April 2019 dari situs <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/program-strategis/basajan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Internationale_Zusammenarbeit#Profil (diakses pada tanggal 14/11/2019 Pukul 14:39)

https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa (diakses pada tgl 14/11/2019 pukul 14:06)

perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/metropolitan/3 (diakses pada tgl 11/11/2019 pukul 08:10)

Dokumenter

Video Dokumenter Youtube:Kerjasama Basajan, ini kata Bupati Aceh Besar

Video Dokumenter Youtube: Pesona BASAJAN

Film Dokumenter Youtube: Film Eumpang Breuh 2019 - BASAJAN

DAFTAR PERTANYAAN

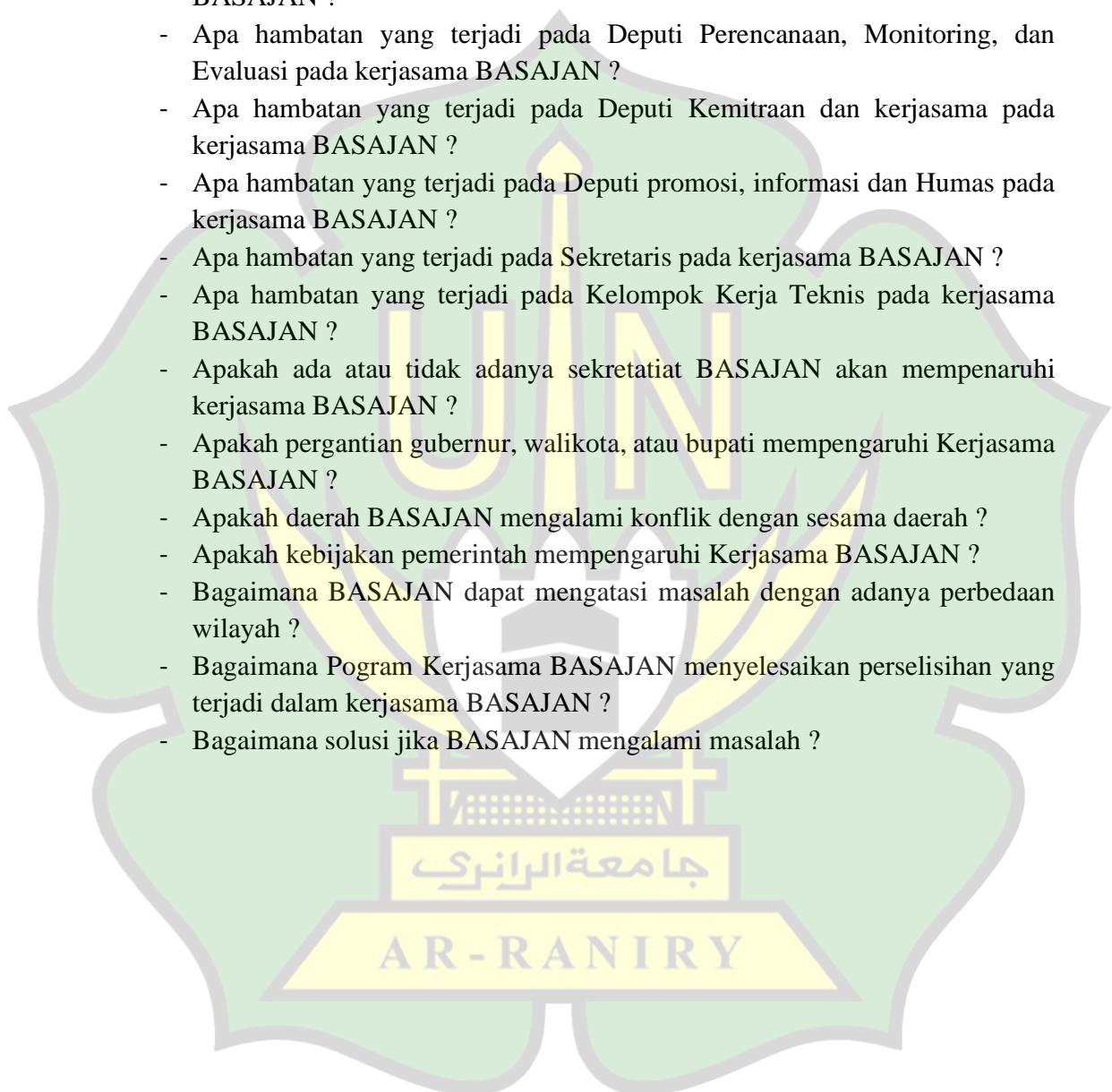
1. Bagaimana sejarah perkembangan kerjasama antar daerah BASAJAN ?

- Apa yang menjadi landasan dalam menjalankan program kerja sama BASAJAN ?
- Apa saja bentuk-bentuk program kerja sama BASAJAN ?
- Apakah BASAJAN masih berlangsung sampai sekarang ?
- Untuk masyarakat biasa atau masyarakat yang awam (belum familiar dengan dengan nama BASAJAN), apakah masyarakat mengetahui adanya program kerjasama BASAJAN ?
- Apa strategi pembangunan BASAJAN dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat ?
- Bagaimana sebelum dan setelah adanya program BASAJAN ?
- Bagaimana tahap Program Kerjasama BASAJAN ?
- Bagaimana fungsi Program Kerjasama BASAJAN ?
- Bagaimana struktur/keorganisasian Program Kerjasama BASAJAN ? (Jelaskan ?)
- Apa indikator program BASAJAN ?
- Bagaimana perbedaan BASAJAN dalam Cita-cita daerah (BANDA ACEH) ?
- Apakah ada pihak lain yang campur tangan dalam Program Kerjasama BASAJAN ?
- Apakah ada pembicaraan rutin/rapat yang dilakukan oleh BASAJAN untuk mengevaluasi Kerjasama BASAJAN ?
- Program apa saja yang sudah berhasil dijalankan oleh BASAJAN ?
- Program apa yang gagal dikerjakan oleh BASAJAN ?
- Program apa yang sekarang dijalani oleh BASAJAN saat ini ?
- Apa program yang akan datang yang dijalankan oleh BASAJAN ?
- Apakah sumber pembiayaan BASAJAN hanya pada APBN, APBD dan APBD saja ? apakah ada sumber pembiayaan yang lain ? jika ada apa saja ?
- Apa kepanjangan dari DED dan GTZ dari Jerman ?

2. Faktor-faktor penghambat jalannya program Kerjasama pembangunan antar daerah Basajan

- Apa yang menjadi hambatan terhadap kerjasama BASAJAN ?
- Pengaruh apa yang disebabkan program BASAJAN tidak jalan ?
- Bagaimana hambatan internal yang terjadi didalam kerjasama BASAJAN

- Bagaimana hambatan eksternal yang terjadi didalam kerjasama BASAJAN ?
- Apa hambatan yang terjadi pada Dewan pengarah pada kerjasama BASAJAN ?
- Apa hambatan yang terjadi pada Ketua Badan pada kerjasama BASAJAN ?
- Apa hambatan yang terjadi pada Wakil Ketua Badan pada kerjasama BASAJAN ?
- Apa hambatan yang terjadi pada Deputy Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi pada kerjasama BASAJAN ?
- Apa hambatan yang terjadi pada Deputy Kemitraan dan kerjasama pada kerjasama BASAJAN ?
- Apa hambatan yang terjadi pada Deputy promosi, informasi dan Humas pada kerjasama BASAJAN ?
- Apa hambatan yang terjadi pada Sekretaris pada kerjasama BASAJAN ?
- Apa hambatan yang terjadi pada Kelompok Kerja Teknis pada kerjasama BASAJAN ?
- Apakah ada atau tidak adanya sekretariat BASAJAN akan mempengaruhi kerjasama BASAJAN ?
- Apakah pergantian gubernur, walikota, atau bupati mempengaruhi Kerjasama BASAJAN ?
- Apakah daerah BASAJAN mengalami konflik dengan sesama daerah ?
- Apakah kebijakan pemerintah mempengaruhi Kerjasama BASAJAN ?
- Bagaimana BASAJAN dapat mengatasi masalah dengan adanya perbedaan wilayah ?
- Bagaimana Pogram Kerjasama BASAJAN menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kerjasama BASAJAN ?
- Bagaimana solusi jika BASAJAN mengalami masalah ?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 113/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si : Sebagai pembimbing pertama
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. : Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Radhiyati
NIM : 150802002
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Analisis Terhadap Hambatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Studi Kasus Kerjasama Basajan)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DiPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

An. Rektor
Dekan,

Ermita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diteliti dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1664/Un.08/FISIP /PP.00.9/07/2019

30 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Kepala BAPPEDA Kota Banda Aceh

di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Radhiyati
NIM : 150802002
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Analisis Terhadap Hambatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Studi Kasus Banda Aceh, Sabang dan Jantho)

Lokasi Penelitian : Kantor BAPPEDA Kota Banda Aceh, Sabang dan Jantho

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1664/Un.08/FISIP /PP.00.9/07/2019

30 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Kepala BAPPEDA Aceh Besar

di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Radhiyati
NIM : 150802002
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Analisis Terhadap Hambatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Studi Kasus Banda Aceh, Sabang dan Jantho)

Lokasi Penelitian : Kantor BAPPEDA Kota Banda Aceh, Sabang dan Jantho

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Ernita Dewi

جامعة الرانيري

AR-RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1664/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Juli 2019

Kepada Yth,

Bapak Kepala BAPPEDA Kota Sabang

di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Radhiyati
NIM : 150802002
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Analisis Terhadap Hambatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Studi Kasus Banda Aceh, Sabang dan Jantho)

Lokasi Penelitian : Kantor BAPPEDA Kota Banda Aceh, Sabang dan Jantho

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewi

جامعة الرانيري
AR-RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 551

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-1664/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Radhiyati

Alamat : Jl. Mata Ie, Gp. Ulee Tuy, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Analisis Terhadap Hambatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Studi Kasus Banda Aceh, Sabang Dan Jantho)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Analisis Terhadap Hambatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Studi Kasus Banda Aceh, Sabang Dan Jantho) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Kantor WaliKota Banda Aceh
- BAPPEDA Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Ernita Dewi (Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Agustus 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,



[Signature]
Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda/ NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BADAN KESBANG DAN POLITIK

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho, Telp./Fax. (0651) 92145

SURAT PEMBERITAHUAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 98 / 2019

Membaca : Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor : B-2493/Un.08/FISIP/PP.009/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Penyusunan Skripsi.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Sekretaris Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 070/0241.D.1 Tanggal 21 Januari 2014 Rekomendasi Penelitian.
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian ybs.

Dengan ini memberi Rekomendasi/Izin untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Radhiyati
Nomor Mahasiswa : 150802002
Alamat : Gampong Ulee Tuy Kec.Darul Imarah Kab. Aceh Besar
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Daerah Penelitian : Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Besar
Lama Penelitian : 03 Desember 2019 s/d 03 Maret 2020
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Hambatan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harap melapor kepada Kepala Dinas,Badan/ Camat tujuan dimana tempat yang akan dilkakukan Penelitian dengan menunjukkan surat izin Penelitian/Rekomendasi.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat/Budaya setempat.
4. Apabila masa berlaku surat izin sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka perpanjangan harus diajukan oleh instansi pemohon
5. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

6. Setelah selesai mengadakan kegiatan agar memberikan laporan Penelitian kepada Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Aceh Besar.

DIKELUARKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 03 DESEMBER 2019

Kepala Badan Kesbang, Politik
Kabupaten Aceh Besar



Pembina Tk.I
NIP.19701106 199103 1 003

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di - Kota Jantho
2. Kepala BAPPEDA Aceh Besar di - Kota Jantho
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam
4. Pertinggal





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RANGKA KERJASAMA DAERAH BASAJAN

PADA HARI INI SELASA TANGGAL DUA BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU SEMBILAN BELAS, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI WALIKOTA BANDA ACEH, WALIKOTA SABANG DAN BUPATI ACEH BESAR, DENGAN PERTIMBANGAN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 363 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH, SEPAKAT UNTUK MENJALIN KERJASAMA DAERAH ANTARA KOTA BANDA ACEH, KOTA SABANG DAN ACEH BESAR YANG DISEBUT KERJASAMA BASAJAN, YAITU:

1. KERJASAMA BASAJAN SEBAGAI USAHA BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH TIGA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK.
2. PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH DALAM BERBAGAI PROGRAM DAN KEGIATAN AKAN DIATUR DALAM Masing-Masing PERJANJIAN KERJA SAMA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
3. DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH BASAJAN DIBENTUK SEKRETARIAT BERSAMA YANG TERDIRI DARI PERWAKILAN Masing-Masing DAERAH, YANG DIATUR DAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH KERJASAMA BASAJAN

DEMIKIAN KESEPAKATAN BERSAMA KAMI BUAT UNTUK PELAKSANAAN SELANJUTNYA, TERIMAKASIH.

DIBUAT DI SABANG,
TANGGAL 2 APRIL 2019





DEKLARASI BASAJAN

Kami Walikota Banda Aceh, Walikota Sabang, Bupati Aceh Besar, dengan ini menyatakan sepakat:

1. Melakukan Kerjasama Regional Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar dalam wadah BASAJAN.
2. Menyatakan akan melakukan kerjasama Regional dalam bidang pariwisata, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur.
3. Menyatakan akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk membangun kerjasama BASAJAN menjadi sebuah kawasan ekonomi baru.

Banda Aceh, Jum'at 12 Juni 2009 M
18 Djumadil Akhir 1430 H

Walikota Banda Aceh,

Mawardy Nurdin

Walikota Sabang,

Munawar Liza Zainal

Bupati Aceh Besar,

Bukhari Daud

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Bapak Faisal Azwar, S.T., M.T Kepala BAPPEDA Kota Sabang



**Wawancara Dengan Bapak Putra Rizkiya Tenaga Ahli Perencanaan Regional
BAPPEDA Kota Banda Aceh**



Wawancara Dengan Bapak Pak Agustiar St M.Se (Subbid Pengembangan Infrastruktur) BAPPEDA Aceh Besar

